



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VI DPRRI DENGAN
KETUA KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA (KPPU), KEPALA
BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN), KEPALA BADAN
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS BATAM (BP BATAM), DAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
(BPKS)**

Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	V
Rapat Ke-	:	...
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Selasa, 8 Juni 2021
Waktu	:	10.53 s.d. 13.59 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPRRI Gedung Nusantara I Lt, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	:	Mohamad Hekal, M.B.A., Wakil Ketua Komisi VI DPRRI
Acara	:	Pembahasan RKP dan RKA K/L Tahun 2022.
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI DPRRI
Hadir	:	A. Anggota DPRRI: 37 dari 54 orang Anggota dengan rincian: <ol style="list-style-type: none">1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP) 7 dari 12 orang Anggota<ol style="list-style-type: none">1. Adisatrya Suryo Sulistio2. Muhammad Prakosa3. Darmadi Duriyanto4. Rieke Diah Pitaloka5. I Nyoman Parta, S.H (matriks)6. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.7. Sondang Tiar Debora Tampubolon

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
7 dari 8 orang Anggota
 1. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
 2. Ir. H. Mohammad Idris Laena
 3. Drs. Mukhtarudin
 4. H. Singgih Januratmoko, S.K.H, M.M.
 5. Doni Akbar, S.E.
 6. Trifena M. Tinal, B.Sc.
 7. Nusron Wahid

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
6 dari 7 orang Anggota
 1. Mohamad Hekal, M.B.A.
 2. Andre Rosiade
 3. Khilmi
 4. Ir. H. La Tinro La Tunrung
 5. M. Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M.,
M.B.A.
 6. Hendrik Lewerissa, S.H., L.L.M.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM
(F-NASDEM)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Drs. H. Nyat Kadir
 2. H. Subardi S.H., M.H.
 3. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.
 4. Muhammad Rapsel Ali

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
(F-PKB)
5 dari 6 orang Anggota
 1. Ir. H. M. Nasim Khan
 2. Tommy Kurniawan
 3. Marwan Ja'far
 4. Drs. H. Mohmmad Toha, S.Sos., M.Si.
 5. Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
3 dari 5 orang Anggota
 1. DR. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
 2. Muhammad Dhevy Bijak
 3. Hj. Melani Leimena Suharli

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
(F-PKS)
3 dari 4 orang Anggota
 1. Amin AK.M.M.
 2. Hj. Nevi Zuarina
 3. Rafli

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
2 dari 5 orang Anggota
 1. Abdul Hakim Bafagih
 2. Daeng Muhammad, S.E.,M.Si
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

B. UNDANGAN:

1. KETUA KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA (KPPU)
2. KEPALA BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)
3. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)
4. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A. / F-P.GERINDRA):

Salam sejahtera buat kita semua,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI, dan

Selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Wakil Ketua Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang beserta seluruh jajarannya,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPRRI pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat serta terhindar dari wabah Covid.

Sehubungan dengan kondisi yang tidak kondusif saat ini terkait dengan penyebaran virus Covid rapat-rapat yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan dengan mitra kerja dilakukan dengan ketentuan antara lain:

- Berdasarkan Pasal 226 Ayat(3) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib berbunyi: "Semua jenis rapat DPR dilakukan di

Gedung DPR kecuali ditentukan lain rapat dapat dilakukan diluar Gedung DPR atas persetujuan Pimpinan DPR, maka pelaksanaan dapat dilakukan secara tatap muka dan atau secara virtual.”

- Peliputan pelaksanaan Rapat Komisi VI dilakukan *livestreaming* oleh TV Parlemen dan Media Cetak, dan Elektronik lainnya mendapatkan sumbernya dari TV Parlemen.
- Berdasarkan Pasal 249 Ayat(1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa untuk kepentingan administrasi setiap anggota menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat dan dapat juga dilakukan secara elektronik kehadiran anggota tercatat dalam list partisipasi aplikasi zoom.
- Rapat dihadiri paling banyak 20% dari jumlah Anggota Komisi serta mitra kerja dengan komposisi:
 - Pendamping mitra kerja berjumlah 5 orang dan ditempatkan di balkon ruang rapat Komisi;
 - Pendamping dari mitra kerja tidak berhubungan langsung dengan rapat dan tidak tertampung di balkon diminta untuk meninggalkan gedung DPR;
 - Pendamping dari mitra kerja yang tidak tertampung di ruang rapat ataupun di balkon dapat mengikuti rapat secara virtual;
 - Pendamping dari pada anggota, tenaga ahli, dan staff administrasi yang tidak juga diminta untuk tidak mendampingi anggotanya ke komisi.

Selanjutnya berdasarkan surat Ketua DPR Nomor : PW/10736/DPRRI/11/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Pembatasan Kehadiran Fisik pada rapat-rapat kami meminta kesepakatan tentang tata cara rapat yang dilakukan sebagai berikut:

- Kegiatan rapat-rapat di komisi dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat.
- Lamanya pelaksanaan rapat disepakati pada saat pembukaan rapat tidak lebih dari *dua setengah jam*.
- Alur rapat sebagai berikut:
 - Pembukaan;
 - presentasi singkat oleh Kementerian Lembaga dan Instansi;
 - pertanyaan anggota;
 - tanggapan kementerian lembaga atau instansi;
 - tanggapan balik dan tanggapan akhir;
 - kesimpulan; serta
 - penutup.
- Presentasi awal dilakukan diberikan waktu 5 menit dan tanggapan 10 menit;
- Anggota diberikan waktu untuk bertanya selama 3 menit;
- Lalu lintas diatur oleh admin yang membantu pimpinan rapat terutama dalam menghidupkan dan mematikan mikrofon.

Bapak Ibu dan hadirin yang kami muliakan,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI Rapat Dengar Pendapat hari ini dihadiri dan ditandatangani oleh 22 orang dari 8 fraksi sehingga dengan demikian kuorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan Pasal 281

Ayat(1) peraturan DPR tahun 2020 tentang Tata Tertib. Maka perkenankan kami membuka Rapat ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum. Setuju ya.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.57 WIB)

Baik.

Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala BSN, Ketua KPPU, Wakil Kepala BP Batam, dan Kepala BPKS Sabang atas kesediaan waktunya untuk menghadiri rapat kerja pada Rapat Dengar Pendapat pada hari ini dalam rangka pembahasan RKP K/L dan RKA K/L Tahun 2022.

Sebagaimana kita ketahui tata cara pelaksanaan tugas komisi di bidang anggaran sebagaimana diatur Pasal 59 Ayat (2) Peraturan DPRRI Nomor 1/2020 tentang Tata Tertib antara lain mengadakan pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan pemerintah untuk disampaikan ke Badan Anggaran DPRRI.

Perlu kami sampaikan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPRRI pada hari ini adalah sesuai dengan surat dari Pimpinan Badan Anggaran dengan nomor AG/03981/DPRRI/3/2021 tanggal 23 Maret 2021 mengenai penyampaian rancangan jadwal pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan RKP tahun 2022 yang menjadwalkan Rapat Kerja Komisi-komisi dengan Mitra kerjanya antara tanggal 2 sampai dengan 10 Juni 2021. Untuk itu kami meminta persetujuan untuk rapat ini kita akhiri jam sementara 12.30 WIB ya.

(RAPAT:SETUJU)

Selanjutnya kita minta penjelasan dari masing-masing mitra untuk menyampaikan materinya masing-masing. Kami persilakan kita mulai dengan Kepala BSN, ada? Oke siap, silakan.

KEPALA BSN:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Yang terhormat Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI,

Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Shalom.

Om Swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini kita bisa berkumpul dalam Rapat Dengar Pendapat antara

Komisi VI DPRRI dengan BSN, KPPU, BP Batam, dan BPKS Sabang untuk melakukan pembahasan RKP K/L dan RKA K/L Tahun 2022.

Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI yang kami muliakan.

Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: S-361/MK.02/2021 dan B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022 BSN memperoleh Pagu Indikatif Tahun 2022 sebesar Rp219.677.133.000,- yang dialokasikan ke dalam fungsi ekonomi dengan rincian program sebagai berikut:

1. Untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp149.867.260.000,-; dan
2. Program Standarisasi Nasional sebesar Rp69.809.873.000,-

Pagu Indikatif BSN Tahun 2022 berdasarkan Program Dukungan Manajemen terkait dengan Gaji Pegawai sebesar Rp84,2 miliar, kemudian Operasional Perkantoran sebesar Rp49,4 miliar. Kemudian pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari PNBPN sebesar Rp1,5 miliar.

Kemudian pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait dengan Program Standarisasi Nasional sebesar Rp69,8 miliar yang terdiri dari untuk anggaran Prioritas Nasional sebesar Rp27 miliar. Kemudian pelaksanaan kegiatan yang bersumber pada PNBPN sebesar Rp33,3 miliar dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BSN lainnya sebesar Rp9,3 miliar.

Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI yang kami hormati,

Dalam RKP Tahun Anggaran 2022 BSN mendukung pelaksanaan prioritas nasional:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dengan total anggaran sebesar Rp27.094.600.000,- yang akan digunakan anggaran prioritas nasional tersebut adalah:
 - a. Untuk Standar Nasional Indonesia bidang Mekanika, Energi, Elektronika, Transportasi dan Teknologi Informasi sebesar Rp764.081.000,-; dan
 - b. Untuk SNI bidang Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp726.886.000,-;
 - c. SNI untuk bidang Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal sebesar Rp1.287.729.000,-;
 - d. Pembinaan Penerapan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian bagi pelaku usaha, dan Lembaga Penilaian Kesesuaian, serta Diseminasinya sebesar Rp3.480.237.000,-;
 - e. Pelayanan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di kantor layanan teknis sebesar Rp2.272.000.000,-;
 - f. Untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran untuk bidang Mekanika, Radiasi, dan Biologi sebesar Rp6.533.484.000,-;
 - g. Peralatan Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia sebesar Rp12.030.177.000,-.

Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI yang kami hormati,

Saya mohon izin untuk langsung ke anggaran untuk masing-masing Eselon I di slide nomor nomor 6.

Anggaran BSN Tahun Anggaran 2022 per unit Eselon I beserta *output* utamanya dirinci sebagai berikut:

Yang pertama untuk lingkup Sekretariat Utama pada Program Dukungan Manajemen BSN terdiri dari kegiatan:

- a. Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum BSN dengan *output* utama berupa: Layanan Manajemen SDM, Layanan Hukum, dan Layanan Reformasi Birokrasi dengan alokasi anggaran Rp3.260.286.000,-;
- b. Peningkatan pelayanan perencanaan keuangan dan umum dengan *output* utama berupa: RENJA dan DIPA BSN tahun 2023, Laporan Kinerja, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, kemudian Gaji ASN termasuk Tunjangan Kinerja dan fasilitas sarpras perkantoran dengan alokasi sebesar Rp138.987.676.000,-;
- c. Pelayanan Humas, Kerja sama dan Layanan Informasi sebesar Rp3.097.014.000,-;
- d. Pengawasan Internal Inspektorat sebesar Rp532.500.000,-;
- e. Peningkatan Data dan Sistem Informasi berupa sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.989.784.000,-.

Kemudian untuk Program Pengembangan Standardisasi di bawah lingkup Sekretariat Utama terdiri dari kegiatan Peningkatan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan *output* utama berupa:

- 7 Penelitian Standardisasi dan Penyesuaian;
- 16 Pendidikan dan Pelatihan; dan
- 1 paket pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Kemudian anggaran untuk unit kerja Eselon I di lingkup Deputi Bidang Pengembangan Standar terdiri atau dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.710.480.000,- dengan *output* utama:

- 250 SNI bidang Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal;
- 150 SNI bidang Mekanika, Energi, Elektronika, Transportasi, dan Teknologi Informasi;
- 150 SNI bidang Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian Personal, dan Ekonomi Kreatif.

Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI yang kami hormati,

Untuk unit Eselon I yang lain Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian kegiatan utamanya *output*-nya adalah fasilitasi dan pembinaan penerap SNI yang ditargetkan 200 UMKM dan 60 lembaga atau badan usaha untuk menjadi *role model* penerap SNI yang sudah kita lakukan kurang lebih 5 tahun terakhir.

Kemudian kegiatan peningkatan sistem penerapan standar dengan *output* utama berupa: penyusunan 35 skema penerapan standar dan penilaian kesesuaian serta harmonisasi terhadap 19 regulasi yang berbasis standar dengan anggaran Rp2.191.105.000,-.

Kemudian untuk Eselon I Deputi bidang Akreditasi kegiatannya berupa:

- a. Akreditasi terhadap laboratorium dengan *output* utama 1144 Penilaian Akreditasi Laboratorium dengan anggaran Rp21.065.578.000;
- b. Akreditasi untuk 700 penilaian akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.636.716.000;
- c. Peningkatan sistem dan harmonisasi akreditasi dengan *output* utama berupa dipeliharanya 33 skema akreditasi.

Yang terakhir untuk Kedeputian Standar Nasional Satuan Ukuran *output* utamanya adalah 63 kemampuan pengukuran bidang Mekanika, Radiasi, dan Biologi dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.885.121.000,-. Kemudian 74 kemampuan pengukuran bidang Termoelektrik dan Kimia dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.225.604.000,-.

Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI yang kami hormati,

Untuk Tahun 2022 Badan Standarisasi juga mengajukan permohonan usulan tambahan anggaran sehubungan dengan turunnya Pagu Indikatif dari anggaran tahun ini yang mohon maaf di dalam bahan mungkin lupa tidak terjilid jadi kita selipkan di bagian akhir 1 lembar. Jadi intinya permohonan usulan tambahan anggaran BSN untuk Tahun 2022 adalah untuk peningkatan kemampuan pengukuran standar nasional satuan ukuran dan yang kedua adanya amanah Undang-undang Cipta Kerja 11/2020 dan PP turunannya terutama PP 7 tahun 2021 tentang UMKM yang harapannya BSN bisa ditambah alokasi anggaran sebanyak Rp22 miliar untuk pengadaan alat laboratorium SNSU dan Rp12 miliar untuk fasilitasi dan pembinaan UMKM sesuai dengan amanah Undang-undang Cipta Kerja yang targetnya adalah untuk 400 UMKM.

Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI yang kami hormati,

Demikian paparan kami, kami mohon kiranya Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI yang terhormat dapat mendukung program dan rencana kegiatan kami pada Tahun 2022. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, terima kasih.

Kita lanjutkan kepada KPPU.

KEPALA KPPU:

Terima kasih Pimpinan Sidang.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Asholatu Wassalamu'ala Rasulallah, Nabiyullah, Nabiyullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, la hawla wa laa quwwata illa billah.

Salam sejahtera,

Om Swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan, juga

Salam sehat.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati,

Dalam kesempatan ini perkenankan kami menghaturkan ucapan selamat Idul Fitri kepada yang terhormat Anggota Komisi VI yang merayakan juga mohon maaf lahir batin kepada seluruh Anggota Komisi VI serta Pimpinan juga Sekretariat Komisi VI dan juga kawan-kawan dari BSN, BPKS, dan dari BP Batam semoga kita selalu mendapatkan berkah sehat dan rahmat dalam kegiatan yang kita ingin laksanakan.

Izinkan berapa hal kami ingin jelaskan tentunya sesuai dengan agenda pada Rapat Dengar Pendapat hari ini yaitu pembahasan RKP KPPU Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kegiatan Anggaran. Kami tetap sesuai dengan arahan RPJMN 2020-2024 di Tahun 2022 yang merupakan tahun ketiga kontribusi kami masuk di prioritas nasional yaitu yang pertama ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Juga dalam hal ini adalah prioritas yang ke-5, mengenai penguatan kewirausahaan dan usaha mikro kecil menengah serta koperasi. Dan terakhir yaitu prioritas ke-6, peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi.

Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati,

Program kerja dari apa yang diamanatkan pada RPJMN tersebut pada tahun 2002 KPPU akan memastikan:

1. Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha guna menjamin iklim investasi yang sehat, tentunya juga tidak lupa dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat penegakan hukum persaingan usaha, dan juga pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat yaitu pada program pengawasan persaingan usaha sesuai dengan nomenklatur yang ada di Bappenas;
2. Memastikan terwujudnya tata kelola kelembagaan KPPU melalui *e-government* dan digital dalam rangka peningkatan kualitas layanan manajemen baik internal maupun eksternal dengan nomenklatur program dukungan manajemen.

Secara rinci turunan teknis yang ingin kami lakukan tentunya pada prioritas yang pertama mengenai ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan

berkualitas dan berkeadilan. Sasaran yang kami harapkan yaitu sasaran strategis yang pertama, bagaimana kita bisa mendapatkan tingkat persaingan usaha yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 yaitu yang di indikator oleh Indeks Persepsi Persaingan Usaha skala 1 sampai 7 di mana kami targetkan ada peningkatan ke angka 4,7. Demikian juga yang kedua, bagaimana kita bisa menyelesaikan jumlah meningkatkan persentase proses penegakan hukum persaingan usaha yang sesuai dengan peraturan berlaku targetnya adalah 90%. Untuk sasaran strategis kedua di mana dalam kacamata program dukungan manajemen kita bisa mencapai target sebesar 79 dari skala 1 sampai 100 untuk peningkatan indeks tingkat efektivitas pemanfaatan *e-government* yaitu percepatan dan kemudahan pelayanan, transparansi pelayanan, kepastian waktu, dan juga keamanan data.

Secara lebih rinci lagi ada 3, *mohon maaf* ada 2 sasaran dari masing-masing program kami yaitu:

1. Program Pengawasan Persaingan ada 2 sasaran program:
 - a. Terpenuhinya kualitas advokasi kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah baik pusat dan daerah yang lebih baik;
 - b. Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha.
2. Program Dukungan Manajemen ada dua sasaran juga:
 - a. Penguatan Sumber Daya Manusia KPPU;
 - b. Terwujudnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi.

Pada tanggal 29 April 2021 kami telah menerima Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S-361/MK.02/2021 dan juga dalam hal ini surat dari Bappenas tentang Penyampaian Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun Anggaran 2022 KPPU mendapatkan Pagu Indikatif sebesar Rp99.726.668.000,- tentunya mencermati bahwa pada Tahun Anggaran 2022 ini ada dua program di mana alokasi untuk masing-masing program:

1. Untuk Program Pengawasan Persaingan Usaha dialokasikan Rp16.408.023.000,- fokusnya tentu cukup banyak mulai dari:
 - a. Pemantauan dan kajian Pelaku Usaha;
 - b. Analisa terhadap berbagai Kebijakan Pemerintah;
 - c. Advokasi Persaingan Usaha dan Advokasi Kemitraan;
 - d. Investigasi terhadap dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha;
 - e. Penindakan;
 - f. Penanganan Perkara Persaingan Usaha;
 - g. Yang cukup penting untuk kami sekarang terkait dengan apa masalah Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu penilaian *merger* dan akuisisi para pelaku usaha;
 - h. Pengawasan Kemitraan; dan juga
 - i. Optimalisasi Pengawasan Persaingan Usaha di kanwil-kanwil KPPU di daerah.
2. Untuk Program Dukungan Manajemen alokasi sebesar Rp14.130.248.000,- fokusnya tentunya untuk Dukungan Manajemen ini:
 - a. Ada peningkatan kompetensi investigator kami juga peningkatan kompetensi analisis analisis kebijakan persaingan usaha

khususnya yang terkait dengan analisis penilaian *merger* akuisisi;

- b. Untuk diklat tentunya bagi staff kami yang di penegakan;
- c. Perbaikan infrastruktur kapasitas jaringan internet kami sudah memberlakukan *online* baik persidangan mulai dari proses penelitian hingga pemeriksaan persidangan;
- d. Manajemen Sumber Daya Manusia; dan
- e. Sarana prasarana internal.

Tentunya mayoritas ada alokasi yang terbesar di Belanja Operasional sebesar Rp69.188.197.000,- yaitu terdiri dari Belanja Pegawai dan juga Belanja Operasional Perkantoran masing-masing Rp44.120.992.000,- dan Rp25.067.205.000,-.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI yang kami hormati dan kami banggakan,

Rencana Kegiatan dan Anggaran KPPU Tahun Anggaran 2022 ini tentunya seperti yang disebutkan di awal ditujukan untuk mendukung prioritas nasional, mencapai sasaran strategis baik di dalam program pengawasan persaingan usaha maupun juga program dukungan manajemennya. Sesuai dengan rencana pelaksanaan dari setiap program tentunya Tabel 3 dan Tabel 4 bisa menggambarkan bahwa rencana kegiatan kami ini relatif tidak jauh berbeda, walaupun dengan pengembangan dan sedikit modifikasi karena situasi Covid dan tentunya memperkuat atau ikut mendukung program pemerintah di Pemulihan Ekonomi Nasional.

Bisa dilihat secara rinci di Tabel 3 juga di Tabel 4 baik untuk program pengawasan persaingan usaha dan program dukungan manajemen secara rinci hingga ke belanja pegawai dan belanja operasional. Namun, dari apa yang sudah disampaikan melalui surat bersama antara Kementerian Bappenas dan Kemenkeu kami ingin menyampaikan pada Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI yang kami hormati dan banggakan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hampir mirip dengan BSN yang kita di sana ada beberapa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat secara rinci dalam PP 7 demikian juga tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang tentu merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja di Pasal 119 terdapat perluasan target dan fungsi KPPU yang sebetulnya juga sudah diamanatkan di Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang UMKM, namun ada 4 poin:

1. Di Pasal 119 disebutkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Ayat(1) dan Ayat(2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan pengawasan yang sebagaimana dimaksud dalam Ayat(1) berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat maupun di daerah.
3. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) diatur dengan peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha; dan

4. Ini memang sangat *clear*, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap kemitraan dapat dilaksanakan bersama antara kementerian/lembaga pemerintah, juga nonkementerian terkait dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Tentunya perluasan tugas, penambahan tugas, dan fungsi yang kami terima dari Undang-Undang Cipta Kerja ini kami bersedia dan siap melaksanakan dengan baik karena sesuai dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 yang kami juga punya Perkom Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan.

Namun, dengan tambahan tugas dan perluasan kewenangan dari mulai Sabang sampai Merauke kami memerlukan tambahan sebetulnya yang diajukan adalah sebesar tambahan Rp176.215.331.000,- yang memang kalau dibandingkan dengan pagu indikatif sangat jauh, pagu yang kita harapkan dengan tugas tambahan ini selama 1 tahun di Tahun 2022 yang kami ajukan Rp275.941.799.000,- tentunya ini banyak *heavy* dialokasikan di Program Pengawasan Persaingan Usaha dan juga Belanja Operasional. Demikian sebetulnya yang kami usulkan penambahan anggaran, namun kami memahami situasi yang memang tidak mudah, sedang sulit.

Kami juga ingin melaporkan untuk realisasi anggaran dan capaian *output* pada tahun anggaran 2021 ini per bulan Juni, per Mei sebetulnya kami sudah merealisasikan anggaran sebesar *empat puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu seratus empat puluh lima ribu rupiah* dari pagu yang sudah tersedia maaf yang sudah ditentukan hasil dari *refocusing* yaitu Rp95.641.297.000,- yaitu per Mei akhir 51,94% dari total pagu.

Tentunya di Tabel 5 capaian realisasi ini bisa kita lihat mulai dari tugas kami selaku KPPU baik dari rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat juga daerah ada hal-hal yang sifatnya memang sistem informasi terkait transformasi penanganan perkara dan juga operasionalisasi KPPU yang seluruhnya sekarang mungkin sudah mencapai 70% melalui digital. Kemudian juga kami sampaikan bahwa memang di tahun 2021 ini karena *refocusing* kami juga mendapatkan hal yang sifatnya memang di luar dugaan. Namun, kami berusaha memaksa adanya upaya eksekusi terhadap denda-denda PNBP kami dan *alhamdulillah* walaupun *refocusing* dengan perolehan tambahan ini kita bisa masih bisa berjalan gitu.

Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Pimpinan dan para Anggota Komisi VI DPRRI yang kami hormati juga banggakan. Tentunya kami mengharapkan dukungan dari Komisi VI DPRRI dari amanat yang diberikan, juga tambahan tugas kewenangan yang juga cukup berat, tadi BSN juga hampir sama ya Pak kita memang UMKM kita ingin hidupkan kita kita bantu kita bahwa perekonomian ini kepada pemerataan dan perlindungan kepada pelaku Usaha Kecil Menengah.

Demikian kami sampaikan.

Terima kasih atas kesempatannya.

Billahi taufik wal hidayah.

Fastabiqul khairat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, terima kasih. Kita lanjut kepada BP Batam, silakan Pak.

WAKIL KEPALA BP BATAM:

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua Komisi VI DPRRI,

Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Komisi VI DPRRI,

Yang kami hormati Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kepala Badan Standardisasi Nasional, dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang,

Yang kami hormati juga Bapak Ibu sekalian,

Hadirin yang kami muliakan.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Salam sehat,

Salam damai sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI,

Sehubungan dengan masih adanya sisa waktu bulan Syawal kami beserta jajaran juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin.

Mohon izin menyampaikan dalam kesempatan ini kami Wakil Ketua Wakil Kepala di Batam didampingi oleh beberapa anggota yaitu anggota satu Pak Wahyu, anggota 3 Pak Dirman, anggota 4 Pak Sahril dan beberapa Eselon II yang kami harap nanti bisa membantu kami untuk memberikan penjelasan bila ada pertanyaan atau arahan dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI.

Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,

Selanjutnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam kondisi sehat wal'afiat selama Rapat Dengar Pendapat Komisi VI

DPRRI mengenai Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Anggaran BP Batam Tahun 2022.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati,

Mohon izin sebelum kami sampaikan penjelasan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022, izinkan kami menyampaikan beberapa hal tentang pelaksanaan anggaran tahun 2021 sebagai berikut.

Sejalan dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi dalam tahun 2021 BP Batam melakukan peningkatan belanja melalui pemanfaatan saldo sebesar Rp426,19 miliar sehingga anggaran BP Batam dalam tahun 2021 naik dari *dua triliun empat belas miliar koma dua puluh* menjadi *dua empat empat kosong koma tiga puluh sembilan miliar*. Sumber pendanaan belanja tersebut terdiri dari:

- PNBP Badan Layanan Umum sebesar *dua nol sembilan enam koma tiga sembilan miliar* yang tadi kami sampaikan naik sebesar *empat dua enam koma sembilan belas miliar* dari saldo dari sejumlah *satu enam tujuh puluh koma dua puluh miliar*;
- Sumber lain adalah rupiah murni yaitu sebesar Rp287 miliar;
- Pinjaman luar negeri sebesar Rp45 miliar; dan
- Rupiah murni pendamping pinjaman luar negeri sebesar Rp12 miliar.

Peningkatan belanja dari saldo tersebut dilakukan untuk pembangunan infrastruktur seperti:

- Pembangunan *container yard* Dermaga Utara Batu Ampar sekitar 4 hektar; kemudian
- Untuk revitalisasi kolam terminal Batu Ampar; kemudian
- Untuk pengadaan alat berat cargo terminal Batu Ampar; dan
- Untuk pembangunan dan penataan Jalan RE Martadinata Bab 1 ini adalah jalan menuju Pelabuhan Sekupang.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati,

Realisasi belanja BP Batam tahun 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp463,14 miliar atau mencapai 18,98% dari alokasi total DIPA termasuk pemanfaatan saldo. Secara nominal dan persentase kinerja realisasi belanja tersebut menunjukkan perbaikan dari kinerjanya dalam tahun 2020 yaitu dari Rp345,90 miliar atau 15,74% dalam tahun 2020 menjadi Rp463,14 miliar atau 18,98% dalam tahun 2021. Secara per program realisasi belanja tersebut terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp268,60 miliar atau 29,71% dari alokasi yang berjumlah Rp903,96 miliar; dan
2. Program Pengembangan Kawasan Strategis dengan realisasinya sebesar Rp194,54 miliar atau 12,66% dari alokasinya sebesar *satu lima tiga enam koma empat puluh tiga miliar*.

Masih lambatnya pelaksanaan Anggaran 2021 tidak terlepas dari terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap pergerakan roda ekonomi di Batam dalam tahun 2021 dan masih berjalannya proses pengadaan dari belanja tambahan yang bersumber dari saldo yang kami

sebutkan tadi. Untuk itu BP Batam akan terus berusaha mempercepat proses pengadaan dan realisasi berbagai kegiatan yang telah direncanakan.

Sementara itu, Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati, realisasi penerimaan PNBP tahun 2021 mencapai Rp484,77 miliar atau 29,02% dari pagunya yang berarti menunjukkan kinerja yang lebih rendah dari kinerja pada tahun 2020 baik secara nominal maupun secara persentase realisasinya. Terkait kinerja ini dalam sisa waktu tahun 2021 BP Batam akan berusaha untuk mempercepat realisasi penerimaan PNBP antara lain melalui penagihan piutang dan mempercepat kegiatan yang menghasilkan PNBP.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati,

Dalam tahun 2022 fokus pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah pemulihan industri, pariwisata, dan investasi. Fokus tersebut sejalan dengan salah satu fokus pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Sehubungan dengan itu, dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024, BP Batam akan mendukung perkembangan empat sektor prioritas yaitu:

Yang pertama adalah Industri Manufaktur yang mempunyai nilai tambah tinggi seperti Smartphone, Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Kedirgantaraan.

Yang kedua yang akan kami dukung adalah industri jasa seperti *Maintenance Repair and Overhaul* pesawat dan kapal, *Shipbuilding* dan *Shipyards*, Pendidikan dan Kesehatan Internasional, serta *Financial Service* khususnya *Digital Financial*.

Yang ketiga kegiatan Pengembangan Logistik seperti *Transshipment*, *e-commerce*, *Warehouse*, dan *Infrastructure Link*.

Serta yang keempat adalah pariwisata yang berfokus pada pembangunan destinasi wisata dan *event* pariwisata, serta pengembangan industri kreatif (*Cinematography*).

Sejalan dengan hal tersebut strategi yang dijalankan mulai tahun 2021 dan masih akan dijalankan dalam tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan investasi dalam sektor industri, jasa, logistik, dan pariwisata;
2. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Sektor Prioritas seperti air, jalan, dan fasilitas logistik;
3. Meningkatkan Kapasitas SDM dan Organisasi;
4. Meningkatkan Pelayanan dengan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi;
5. Meningkatkan Pemanfaatan Aset untuk menghasilkan penerimaan yang optimal; dan
6. Menurunkan biaya logistik dalam rangka mendorong daya saing ekonomi.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati,

Mengenai anggaran tahun 2022 dapat kiranya kami sampaikan bahwa sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-361/MK.02/2021 dan B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021 Pagu Indikatif Belanda BP Batam Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.273,25 miliar. Jumlah tersebut bersumber dari PNB/BLU sebesar Rp2.088,67 miliar atau 91,88%, Rupiah Murni sebesar Rp40,57 miliar atau 1,79%, Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp124 miliar atau 5,45%, dan Rupiah Murni Pendamping Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp20 miliar atau 0,88%.

Selanjutnya pagu tersebut dialokasikan untuk dua program yaitu yang pertama adalah Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.021,37 miliar atau 44,93%, dan yang kedua adalah Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp1.251,87 miliar atau 55,07%.

Terkait program pertama yaitu Program Dukungan Manajemen kegiatan utamanya adalah kegiatan operasional seperti kepegawaian, pemeliharaan dan jasa. Sementara itu kegiatan-kegiatan dalam Program Pengembangan Kawasan Strategis adalah program yang mendukung prioritas nasional antara lain adalah:

1. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Batam yaitu:
 - a. Pengadaan alat bongkar muat;
 - b. Penataan *container yard* Dermaga Utara;
 - c. Penataan jalan kawasan terminal Batu Ampar;
 - d. Revitalisasi Dermaga Selatan fase 1 Batu Ampar; dan
 - e. Revitalisasi *container yard* Dermaga Selatan Batu Ampar.
2. Peningkatan Fasilitas Kesehatan yaitu:
 - a. Pengadaan peralatan penanganan Cancer atau Radio Therapy.
3. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan akses jalan dan drainase antara lain:
 - a. Pembangunan jalan layang Simpang Sei-Ladi tahap 1;
 - b. Pembangunan Jalan Yos Sudarso tahap 1; dan
 - c. Penataan Jalan R.E Martadinata tahap 1.
4. Pengembangan infrastruktur Bandara Hang Nadim yaitu:
 - a. Pembangunan Terminal Cargo Bandara Hang Nadim ini merupakan proyek *multiyears* dari tahun 2021 dan akan dilakukan dalam tahun 2022; dan
5. Penyusunan rencana pengembangan *Maritim City* yaitu:
 1. Studi kajian pengembangan kawasan berorientasi transit di Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati,

Mohon izin menyampaikan bahwa jumlah anggaran dalam Pagu Indikatif Tahun 2022 tersebut lebih rendah dari jumlah anggaran yang diusulkan pada rancangan awal Rencana Kerja Tahun 2022 sebesar Rp2.734,49 miliar, hal tersebut utamanya karena lebih rendahnya pagu Rupiah Murni yaitu dari usulan sebesar Rp501,82 miliar dialokasikan dalam Pagu Indikatif sebesar Rp40,57 miliar. Usulan anggaran Rupiah Murni sebesar Rp501,82 miliar berikut sangat diperlukan oleh BP Batam karena akan digunakan untuk pengembangan konektivitas laut, pengembangan

konektivitas udara, pengembangan konektivitas jalan, dan sarana bidang kesehatan.

Mengingat pentingnya kegiatan yang akan kami yang akan didanai dengan anggaran Rupiah Murni tersebut dalam kesempatan ini kami mohon dengan sangat dukungan dari yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI agar kekurangan anggaran Rupiah Murni sebesar Rp461,25 miliar tersebut dapat dipenuhi sehingga perkembangan Batam ke depan akan lebih optimis dan maju.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI,

Mengingat upaya pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ke depan memerlukan dana yang tidak seluruhnya bisa dipenuhi dari APBN, maka dalam tahun 2022 BP Batam akan terus mengusahakan dukungan dana non-APBN sesuai aturan yang berlaku. Skema yang akan kami kembangkan adalah pemanfaatan aset melalui pola kerja sama seperti Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja sama Operasi (KSO), dan Kerja sama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI) khususnya terkait dengan pengembangan dan pengelolaan Bandara Hang Nadim, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan, pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), serta beberapa kegiatan lain.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati,

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan mengenai realisasi Rencana Kerja RKP dan realisasi Anggaran Tahun 2021, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022. Atas perhatian, bantuan, dan dukungan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI yang terhormat kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, terima kasih.

Dan yang terakhir Bapak BPKS Sabang, silakan.

KEPALA BPKS SABANG:

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat Komisi VI DPRRI,

Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu para Anggota Komisi VI DPRRI yang ada di dalam ruangan dan juga yang ikut di zoom, serta hadirin yang kami muliakan,

Yang terhormat Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha,

Yang terhormat Ketua Badan Standardisasi Nasional,

Yang terhormat Kepala BP Batam atau Wakil,

Yang terhormat para hadirin yang ada di dalam ruang yang berbahagia ini.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan kenan-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka Rapat Dengar Pendapat tentang Rencana Kerja Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi VI yang terhormat,

Fokus pembangunan dan pengembangan kawasan Sabang Tahun 2022:

1. Optimalisasi aset BPKS dalam usaha meningkatkan investasi pada sektor kepelabuhanan, pariwisata, pemanfaatan aset, jasa dan *infrastructure*;
2. Fungsionalisasi aset BPKS;
3. Komersialisasi aset BPKS.

Rencana kegiatan strategis BPKS pada Tahun Anggaran 2022 di dalam pengembangan kawasan adalah:

- Kawasan Sabang sebagai tujuan investasi, terbuka, dan kompetitif;
- Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung investasi di kawasan Sabang;
- Peningkatan PNBP BPKS;
- Modernisasi layanan bisnis BPKS;
- Reformasi tata kelola kelembagaan BPKS yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- Layanan dukungan manajemen BPKS yang berkualitas.

Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi VI yang terhormat,

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-361/MK.02/2021 dan B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022 BPKS mendapatkan alokasi Pagu sebesar Rp71.729.718.000,- dari Rupiah Murni dan dari Badan Layanan Umum BPKS sebesar Rp5.744.065.000,- sehingga total Pagu Indikatif BPKS Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp77.473.783.000,-.

Pimpinan Anggota Komisi VI yang terhormat,

Pagu anggaran tersebut akan dialokasikan dalam program Badan Pengusahaan Kawasan Sabang yang terdiri dari 2:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp41.681.770.000,-;
2. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp35.792.013.000,-.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang terhormat,

Alokasi anggaran Program Dukungan Manajemen yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Umum, Program dan Anggaran, serta Penelitian dan Pengelolaan Data informasi sebesar Rp230.722.000,-;
2. Koordinasi bidang Hukum, Kehumasan, Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan, Perpustakaan kearsipan, dan Peningkatan SDM sebesar Rp40.195.964.000,-;
3. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Penatausahaan Akuntansi dan Pelaporan berbasis Akrual sebesar Rp375.000.000,-;
4. Pengawasan Akuntabilitas dan Pengendalian Pelaksanaan Keuangan sebesar Rp348.000.000,-;
5. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kinerja Kelembagaan sebesar Rp532.084.000,-.

Alokasi anggaran untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana kawasan serta Sarana dan Prasarana pendukungnya sebesar Rp1.337.498.000,-;
2. Penyelenggaraan Pengembangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan serta Sarana dan Prasarana pendukungnya sebesar Rp22.001.916.000,-;
3. Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Kawasan Pemanfaatan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebesar Rp1.720.000.000,-;
4. Pengembangan Promosi dan Kerja sama Pengembangan Kawasan sebesar Rp1.163.365.000,-;
5. Penyelenggaraan Program Pengembangan Usaha dan Investasi sebesar Rp1.000.075.000,-;
6. Pengelolaan Pemanfaatan dan Pengamanan Aset BPKS sebesar Rp2.275.560.000,-;
7. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu besar Rp468.134.000,-;
8. Penyelenggaraan Manajemen Pelabuhan Berstandar Internasional sebesar Rp5.825.465.000,-.

Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi VI yang terhormat,

Program pengembangan kawasan strategis BPKS pada Tahun 2022 tidak hanya fokus kepada kota Sabang saja, tetapi untuk pengembangan akan dilaksanakan di Pulau Aceh di antaranya adalah:

- Pembangunan ruas jalan Lamteng-Deudap;
- Peningkatan ruas jalan Gugop-Ulee Paya;
- Pemeliharaan jalan Gugop-Lhuen Balee;
- Pembangunan jalan dan jembatan penghubung Aroih Lampuyang;
- Pengadaan Meubiler Gedung Serba Guna Pulau Aceh;
- Pemantauan Lingkungan Hidup atau AMDAL.

Pembangunan di kota Sabang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Kantor Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Balohan;
2. Pembangunan ruas jalan wisata Lhokweng;
3. Pemeliharaan Gedung Pelabuhan Balohan;
4. Rencana Induk Sistem Manajemen Informasi terintegrasi BPKS;
5. Peningkatan Gedung Kantor Pusat BPKS

Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi VI yang terhormat,

Demikian kami sampaikan.

Atas perhatian dari Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPRRI yang terhormat kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik.

Terima kasih atas penjelasan dari masing-masing lembaga.

Saya lihat ada 1 kemiripan kecenderungan anggarannya menciut semua ya, menciutnya luar biasa. Baik, kami berikan kesempatan untuk tanggapan dulu dari anggota ada yang, iya, Pak Amin silakan Pak.

F-PKS (AMIN AK, M.M.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan Komisi VI dan teman-teman Anggota Komisi VI,

Saya perlu karena jarang ketemu nih *ngafalin* nama-namanya takut salah nanti ya.

Yang terhormat Pak Pak Kukuh ya Pak pakai pakai masker Pak belum terlalu dekat maskeran ya takut salah. Terus Pak Kodrat nih Pak kalau maskernya dilepas kelihatan gantengnya Pak ya. Terus Pak Pak Iskandar panggilannya Pak Iskandar atau Pak Zul Pak? Pak Iskandar dan Pak Purwiyanto dan teman-teman semua yang hadir di tempat ini yang saya hormati dan saya cintai yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Saya hanya akan bertanya kedua aja ya Pak Kodrat dan Pak Kukuh, kalau ke Pak Purwiyanto saya takut soalnya ada Pak Nyat di sini yang **(suara tidak jelas)** BP Batam. Takut Pak saya tanya Bapak BP Batam ada Pak Nyat masalahnya. Bapak Iskandar saya takut ada Bang Rafli takut pertanyaan saya malah disalahin, selalu setia hadir tuh Pak bang Rafli Pak kalau Pak Iskandar hadir pasti hadir dia, hadir fisik dibela-belain dari Aceh jauh-jauh hadir fisik.

Pertama pertanyaan saya pertama untuk Pak Kodrat ya, *mana tadi barusan saya tulis takut salah*. Jadi, dari yang *news* dulu Pak nih *nggak* terkait

anggaran dulu Pak ini karena saya sangat tertarik yaitu temuan KPPU ya tentang adanya 62 orang anggota direksi atau komisaris yang merangkap jabatan dan yang menarik itu rangkap jabatannya 1-22 gitu itu sempat viral benar-benar. Pertanyaan saya tuh pertama Pak, itu kok informasi ini kok kayaknya baru sekarang itu lho Pak baru tahun ini aja gitu tahun-tahun sebelumnya belum ada tuh karena saya kurang perhatian atau karena saya baru jadi Anggota Dewan sekarang aja gitu.

Itu sebetulnya memang menjadi program ada program kerjanya atau masuk di apa ini direktorat mana nih di KPPU atau memang ini spontanitas gitu menarik perhatian KPPU gitu, ya itu hanya di tiga sektor usaha kalau *nggak* salah investasi keuangan asuransi, kemudian apa pertambangan dan konstruksi kalau *nggak* salah Pak ya. Nah, terus kelanjutannya itu gimana Pak yang lain itu bagaimana? Kemudian, apakah ini sudah ada respon juga dari pihak-pihak terkait Kementerian BUMN dan sebagainya, itu yang pertama.

Kemudian, yang kedua terkait dengan anggaran ini. Bapak mengajukan penambahan anggaran lumayan Pak ya berapa ini, cukup besar ini ya *satu tujuh puluh enam eh satu lima puluh satu* ya ya sebetulnya kalau dilihat dari tupoksi dan juga perluasannya KPPU itu kami sendiri sangat mendukung Pak, justru kalau anggaran KPPU terus berkurang dari tahun ke tahun ini kami ikut prihatin ya agar apa namanya kerja-kerja KPPU dan hasil-hasilnya itu benar-benar bisa di-*follow up* dan apa namanya tupoksi KPPU yang selama ini dijalankan dengan anggaran yang minimal itu bisa benar-benar berdaya guna dan berhasil guna itu yang terkait dengan anggaran.

Kemudian yang berikutnya, *sementar ini tulisnya spontanitas Pak*. Data yang kami dapatkan sepanjang tahun 2020 KPPU telah menangani 36 kasus yang terdiri dari 17 kasus pelanggaran persaingan usaha, 11 perkara keterlambatan pemberitahuan *merger* dan akuisisi, serta 8 perkara pelanggaran pelaksanaan kemitraan dan total realisasi pendapatan negara dari denda persaingan usaha selama tahun 2020 mencapai Rp35,9 miliar. Sementara itu seluruh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan kontribusi bagi pendapatan negara hingga Rp864 miliar. Nah, ini yang mendukung kami itu mendukung ya untuk penambahan anggaran KPPU agar apa namanya kerja-kerja besar KPPU itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh dunia usaha ya Pak.

Yang berikutnya ini juga berita yang lagi hangat ini Pak tentang *merger*-nya ini baru rencana atau sudah dalam proses kalau *nggak* salah sudah dalam proses Pak, *merger*-nya Gojek dan Tokopedia. Nah, ini pertanyaan saya, apa yang sudah dilakukan oleh KPPU untuk apa namanya mengantisipasi ya timbulnya pasar oligopoli yang nanti dampak dari *merger*-nya 2, 2 apa namanya raksasa digital ya di Indonesia ini karena kalau kita baca di Amerika di Cina itu ada istilah *Big Four*, *Big Five* itu kan ya dan mereka punya bukan punya slogan tapi memang kenyataannya kan menjalankan strategi bisnis *eat in kill* ya semua yang tumbuh yang baru yang masih mau bertumbuh dimakan atau apa namanya dibunuh, dilumat. Nah, ini tentu kita tidak menginginkan hal ini terjadi di Indonesia khususnya untuk pengusaha-pengusaha yang masih masuk level di UMKM tentu saja kebanyakan gitu kan kita tahu UMKM, entah apa namanya Mikro Kecil

Menengah atau bahkan kita menginginkan pelaku usaha Ultra Mikro ini juga tumbuh itu yang jumlahnya sangat banyak hampir 60 juta di Indonesia, itu Pak tutup KPPU.

Kemudian untuk Pak Kodrat nih BSN ya, maaf Pak Kukuh ya BSN. Ada usulan tambahan anggaran total Rp34 miliar Pak ya ini yang satu lembar ini disisipkan ini, yang satu untuk pengadaan alat laboratorium nilainya Rp22 miliar, kemudian untuk fasilitas dan pembinaan UMKM Rp12 miliar, itu di sini disebutkan untuk UMKM itu 400 UMKM. Nah, ini apakah sudah apa Pak terdefiniskan 400 itu di mana saja begitu atau masih angan-angan Pak ya sebarannya di mana atau jenisnya apa 400 itu untuk Rp12 miliar itu sektor usahanya apa saja dan kemudian pengadaan alat laboratorium itu apakah juga tersentral di pusat atau tersebar di mana saja, itu untuk Pak Kukuh ya untuk BSN.

Saya kira itu Pak Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Baik kita ke Pak Subardi.

F-P.NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati serta Anggota,

Rekan Mitra kita ada dari Kawasan Batam, Kawasan Sabang, kemudian BKPS ya sama KPPU, 4 atau 5 ya, ya BPKS maksud saya, dan Badan ini Standardisasi Nasional.

Yang pertama saya ingin menyampaikan pada BSN. Kita cermati bahwa program anggaran yang terdiri dari untuk Dukungan Manajemen dan program untuk Standardisasi Nasional. Kalau saya *nggak nggak nyebut* nilai cuman kita coba persentasekan bahwa untuk memberikan program dukungan manajemen itu prosentasenya 54%, kemudian untuk standarisasinya artinya untuk operasional standarisasinya itu 46%.

Nah, kalau kita bisa lihat sebenarnya BSN itu ke dalam rangka untuk meningkatkan kualitas daripada produk-produk kita utamanya kalau tidak salah itu UMKM agar kita bisa mampu bersaing. Nah, di sini kenapa ini *cost* untuk Dukungan Manajemen jauh lebih tinggi bukan berbalik, apakah ini terlalu banyak *cost* yang digunakan untuk dukungan manajemen, apakah anggarannya yang memang kurang? Oleh karena itu, saya mohon sekiranya untuk bisa didetailkan sebenarnya sasaran itu sasaran yang apa sasaran utama bagaimana meningkatkan daripada produksi menjadikan produksi kita lebih punya daya saing kepada tidak hanya pada lokal tapi pada internasional

internasional itu. Mungkin itu yang kami apa sampaikan pada BSN agar ya perbandingannya tuh agak apa ya bisa bisa ada harapan bukan hanya apa ya secara rutin begini terus tapi ndak ada *nggak* ada *nggak* ada gaungnya di lapisan bawah itu *nggak* ada *nggak* ada sentuhannya ya itu dari BSN.

Kemudian, yang berikutnya dari KPPU. Secara garis besar KPPU itu dari apa apakah itu pendekatan undang-undang, apakah pendekatan kinerja seolah-olah kayak polisi ya pengawas gitu padahal di sini ada sasaran yang harus dilakukan menjadikan sasaran strategis adalah program kemitraan.

Nah, alangkah baiknya program kemitraan itu lebih didetailkan sehingga dibungkus dengan sebuah regulasi agar KPPU punya peran yang sangat yang luas bukan sangat luas, yang luas, karena apa? Angkatan-angkatan kerja atau angkatan bisnis baru itu sekarang ada yang namanya Ultra Mikro artinya dari masyarakat yang paling bawah yang hanya bisa untuk hidup ini tidak hanya sekedar dihidupin tapi mereka dicoba atau diarahkan untuk meningkat kelas dari Ultra Mikro menjadi Mikro, Mikro menjadi Menengah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini semua ya langkah yang dilakukan oleh beberapa perbankan ada BRI, ada Pegadaian, ada PNM ada apa itu dan itu memang merupakan untuk dalam rangka mempercepat proses ya penanganan ekonomi kita alangkah baiknya kalau itu juga dilihat oleh KPPU menjadi program khusus ikut serta dalam rangka untuk mengangkat ataupun mempercepat proses perbaikan ekonomi kita.

Tapi kalau hanya berfokus pada rutinitas atau apa artinya usaha-usaha yang menengah yang memang ada sengketa, yang mungkin kemitraan yang yang memang sudah ada proses hukum, dan sebagainya ya itu *nggak* *nggak* mungkin *nggak* maksimum, tapi ketika punya terobosan ketika punya apa namanya ini ide agar bisa mampu mendayagunakan potensi KPPU di dalam rangka ikut serta mengangkat yang marjinal ini yang paling bawah ini ikut naik kelas. Ini mungkin nanti coba bagaimana ide-ide dan usul-usulannya agar bisa komprehensif di dalam langkah-langkah KPPU.

Kemudian berikutnya yang terakhir nih ini Batam ya Pak. Batam ini prioritasnya cukup baguslah prioritasnya adalah bagaimana untuk berfokus di dalam 2022 ini pemulihan industri pariwisata dan investasi. Nah, saya melihat dari usulan anggaran ini cukup banyak program-program yang bersifat infrastruktur atau belanja alat belanja barang dan sebagainya. Nah, sejauh mana itu korelasinya ataupun dampak ketika bangun apakah itu anggaran itu digunakan infrastruktur dengan program memfokuskan pemulihan industri pariwisata dan investasi sejauh mana. Apakah ini menjadi utama ketika masa pandemi seperti ini? Apakah ada upaya lain sehingga upaya untuk pemulihan industri pariwisata dan sebagainya itu bisa lebih cepat atau mempercepat proses untuk adanya apa pemulihan ya karena karena ini kan ya kita *nggak* tahu pandemi itu mau ke sampai kapan setahun lagi atau setengah tahun lagi kita *nggak* tahu.

Tapi apakah mutlak yang namanya infrastruktur itu dominan untuk kita berikan atau kita bangun ataupun kita anggarkan sehingga fokus pembangunan tahun 2022 itu memang betul-betul akan terealisasi, mohon nanti penjelasan syarat teknis agar ini bisa menjadi apa keputusan dari kita semuanya.

Mungkin itu aja.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang hadir secara fisik maupun secara virtual,

Yang saya hormati Kepala BSN, Ketua KPPU, Kepala BP Sabang, Wakil Kepala BP Batam.

Mungkin terkait anggaran saya tidak akan menyoroti banyak Bapak-bapak semuanya, saya langsung ke BP Batam dan Sabang karena sama persis yang akan saya tanyakan.

Yang pertama baik untuk Kepala BP Sabang dan Wakil Kepala BP Batam, memungkinkan *nggak* Pak kalau misalnya dari dua Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ini itu jika tidak menggunakan APBN? Karena ini kan mengelola kawasan yang ada pemasukannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini dijelaskan ada ada dibutuhkan beberapa anggaran itu untuk pengembangan kawasan. Nah, idealnya kalau kita berusaha ini itu mengembangkan sesuatu baik itu untuk kapasitas produksi ataupun fasilitas itu kan kalau memang *load* usahanya atau dari kapasitasnya itu sudah bertumbuh yang mana biasanya ditunjukkan dengan adanya keuntungan.

Nah, sejauh saya melihat daripada penyerapan anggaran dari dua badan ini, itu kan selalu butuh tambahan anggaran-tambahan anggaran. Nah, ini apakah itu menjadi solusi sebenarnya untuk pengembangan karena kalau *load*-nya udah gede ada *cuan*-nya di situ itu biasanya baru dikembangkan, jangan sampai dikit-dikit nanti pengembangan pengembangan pengembangan tapi tidak ada dampak tidak ada progres yang signifikan. Dua pertanyaan itu untuk BP Batam dan Sabang pertanyaannya sama.

Kemudian ke Kepala BSN. Pak Rp12 miliar untuk pengembangan UMKM ini berarti per UMKM itu kalau saya bagi rata Rp12 miliar bagi 400 itu Rp30 juta. Satu, bentuknya pengembangannya seperti apa? yang kedua, UMKM yang bagaimana? Ini tidak terlalu spesifik menurut saya Pak UMKM itu kan Mikro Kecil Menengah, Mikro yang omzetnya di bawah berapa ratus juta, Kecil yang di bawah berapa ratus juta, dan yang apa Menengah yang di bawah berapa miliar, ini konsepnya seperti bagaimana? Karena di sini juga dijelaskan amanah Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan PP turunannya.

Jadi, jangan sampai anggaran seperti ini itu tidak tepat sasaran kalau pun diberi disetujui usulannya karena kami kan punya fungsi pengawasan di sini Pak, jadi udah anggarannya sedikit ya kan, *load* kerja dari Bapak ini besar

tapi ketika ada penambahan jangan sampai tidak apa tidak tidak pas tidak tidak tidak sesuai, itu yang pertama.

Kemudian, Pak itu terkait pengadaan alat-alat laboratorium ataupun dalam kerjanya itu BSN ini bekerja sama nggak Pak dengan badan-badan yang lain, contoh mungkin dengan badan riset mungkin bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, mungkin bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang lainnya itu sudah terpikirkan atau belum Pak. Kalau misalnya sudah itu gimana sih Pak bentuk kerja samanya saya penasaran karena kan ditengah Covid ini anggaran terbatas duit juga pas-pasan yang kita bisa lakukan kan kolaborasi, kalau Bapak mungkin di Badan mungkin bisa bersama dengan badan-badan yang lain atau kementerian kementerian terkait yang bisa mendukung daripada apa kerja BSN.

Kemudian, di halaman 4 yang Bapak berikan ini, itu ada beberapa *item* peningkatan peningkatan peningkatan selain peningkatan pelayanan perencanaan keuangan itu berarti peningkatan pelayanan SDM, humas, pengawasan internal, dan sistem informasi itu kalau saya total itu ada Rp10 miliar lebih. Nah, di lembaga yang Bapak pimpin ini kan kerjanya kan sudah rutin Pak sudah tahunan orang-orang sudah paham gimana ritme kerjanya. Nah, ini ada anggaran Rp10 miliar untuk peningkatanlah selama ini apa *nggak* ditingkatkan Pak? Maksud saya di tengah kondisi yang serba sulit seperti gini kalau kita bisa menghemat anggaran ya kita hemat aja Pak dialihkan ke fungsi-fungsi yang kira-kira dibutuhkan di lembaga yang Bapak pimpin ini karena lucu juga kalau misalnya banyak peningkatan-peningkatan tapi tidak ada *output* yang yang yang dapat ditunjukkan di sini targetnya juga nggak kelihatan ini Pak apa.

Walaupun, memang fungsi DPR sekarang ini terkait anggaran itu kan sudah diserahkan ke pemerintah kan tapi fungsi pengawasannya kami tetap bisa mengawasi di situ Pak.

Kemudian, untuk ke KPPU selanjutnya. Saya memahami Pak KPPU *nggak* bisa berbuat banyak karena terbelenggu di undang-undang kalau *nggak* salah Pak ya yang kemarin di RDP terakhir itu Bapak presentasi itu. Sebenarnya kalau di KPPU ini itu baru bisa melangkah ketika ada laporan atau bisa bergerak sendiri Pak, itu aja Pak, karena repot repot juga kalau menyoroti KPPU ini karena udah di undang-undangnya masih perlu direvisi soalnya Pak ya seperti itu.

Mungkin itu Pimpinan, ke BP Batam dan Sabang 2 pertanyaan tadi. Kemudian ke BSN ada yang Rp30 juta yang seperti bagaimana, dan kerja sama kementerian atau lembaga terkait seperti apa, dan program peningkatan tuh gimana sih Pak fokusnya. Untuk ke KPPU satu pertanyaan itu aja.

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik Pak Nyat Pak Walikota, silakan.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dua Pimpinan ganteng-gantengnya udah mana yang paling ganteng siapa *ndak* tahu,

Bapak-bapak, Ibu-ibu tak ada mungkin virtual ada ya,

Anggota DPRRI yang saya hormati,

Bapak Kepala KPPU eh Kepala BSN, Ketua KPPU, Kepala BPKS Sabang, dan Wakil Kepala BP Batam beserta seluruh staf yang hadir.

Saya ingin menanyakan kepada semua mitra kerja yang hadir pada hari ini DPR hari ini. Yang pertama BSN ya BSN ini ya samalah semua ini anggaran kita menurun ya Pak Ketua, BSN ini memang belum begitu dikenal di masyarakat ya apa perlu semacam sosialisasi secara meluas kepada masyarakat. Ada tidak dicantumkan dana sosialisasi ini Pak, saya tak baca detail. Seperti BKPM ada sosialisasi dan mulailah ya kerja sama dengan kita ya, akan datang ini di Kepri OSS saya melaksanakan sosialisasi tanggal 14 Juni yang akan datang.

Jadi, masyarakat bisa mengenal istilah OSS itu apa gitu, begitu juga dengan BSN itu apa perlunya standarisasi nasional ini, apa kategorinya ada yang wajib ada yang sukarela kan gitu Pak ya. Nah, yang wajib seperti misalnya sepeda, mainan anak, dan lain segala macam yang. Nah, kalau UMKM Komisi VI ini paling paling besar perhatiannya pada UMKM semua pada gila semuanya memperhatikan UMKM ini. Tapi, ini UMKM ini masuk kategori apa Pak? Maaf saya langsung ini Pak ya interaktif, wajib atau sukarela?

KEPALA BSN:

Sebetulnya dua-duanya Pak, dua-duanya ada yang karena wajib UMKM perlu kita *support* untuk bisa memenuhi standarnya, ada yang memang UMKM secara sukarela ingin menerapkan standar untuk meningkatkan *brand image* dari produk-produknya.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Global gitu ya, itu wajib. Termasuk wajib *nggak* kira-kira?

KEPALA BSN:

Mohon maaf kenapa Pak?

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Wajib atau tidak yang UMKM yang misalnya dia kita mau seperti minta maaf kalau kami ke Batam orang pesan itu yang UMKM yang hasil UMKM yang dari Malaysia yang banyak tuh termasuk kacang-kacangan, kan ada standarnya gitu.

KEPALA BSN:

Memang di Indonesia diatur ada yang standarnya wajib, ada yang tidak wajib Pak. Kalau yang wajib diawasi.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Kalau untuk naik kelas kan semestinya ada standar SNI kan?

KEPALA BSN:

Iya betul Pak, makanya kita melakukan.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Yang dulu dianukan kripik apa itu yang naik kelas itu.

KEPALA BSN:

Iya mungkin kita sudah punya sekitar 600-an percontohan ya Pak *role model* karena keterbatasan.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Nah, itu laku keras kan?

KEPALA BSN:

Iya, beberapa bahkan bisa menembus pasar ekspor karena bisa memenuhi standar tujuan ekspor dari UMKM.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Nah, tapi kan saya baca nih biayanya mahal itu untuk mendapatkan SNI itu ada yang Rp30 juta, ada yang 50 segala macam yang kelas-kelas tadi kan yang anu itu yang udah sebesar itu, tapi kalau UMKM bisa gratis atau tidak biayanya untuk dapat sertifikat ataupun label itu?

KEPALA BSN:

Iya, di Undang-Undang 11/2020 terutama turunannya Pak di PP 7/2021 yang mengatur UMKM di sana memang diatur untuk produk UMKM yang masuk risiko rendah Pak risiko kemudahan berusahanya apa kegiatan usahanya maupun risiko produk.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Tergantung risiko kan?

KEPALA BSN:

Iya tergantung risiko, jadi kalau yang risiko rendah bahkan perintah undang-undang itu untuk langsung diberi tanda SNI.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Iya tanda SNI.

KEPALA BSN:

Artinya gratis gitu kan Pak, tetapi ada lanjutannya karena.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Itu gratis, itu gratis ya Pak?

KEPALA BSN:

Gratis Pak.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Saya minta maaf nih Pak Ketua agak ini agak mendalam ya karena kasihan benar dengan UMKM ini.

KEPALA BSN:

Untuk risiko rendah ya Pak ya, untuk yang risiko rendah kegiatan usaha risiko rendah dan produknya juga berisiko rendah karena ada produk misalnya makanan dan minuman yang diatur dengan Peraturan Badan POM sehingga itu kan harus tetap dipenuhi Pak.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Iya memang UMKM ini kan banyak sekali anunya, sertifikat ala susah ya sekarang harus ber-anu dengan LB POM ya dan dialihkan ke Kemenag.

Kalau dulu biayanya mahal kalau langsung LB POM gitu sampai 3 juta pelatihnannya sekarang kalau Kemenag dibiayai pemerintah. Nah, ini hebatnya pemerintah ini sekarang Undang-undang Cipta Kerja itu. Jadi, kami minta bantu ini tapi untuk ini memang perlu sosialisasilah, tapi anggarannya kecil ya jadi ini.

Kalau KPPU tadi memang yang menguasai itu Pak Amin ini, saya tak perlu tanya lagi ya. Tapi saya dengar ada banyak kemajuan KPPU ada sedang proses-proses ya ada itu ya Pak yang sedang eksekusi yang proses eksekusi ya.

Kalau BP Sabang nih sulit saya mau bicara, tahun kalau tak salah Rp90 miliar tahun ini tinggal 70 70-an 77, ini ada apa. Nah, ini dia yang bicara banyak nanti. Kemarin kita tahun lalu ingin memperjuangkan ya dana yang lebih besar atas kalau kalau ada *roadmap*-nya jelas, tapi masuk Covid ya Pak karena kita ingin supaya bisa sampai Rp500 miliar tapi masuk Covid ya gimana lagi.

Yang terakhir, minta maaf. BP Batam anggarannya Rp2 triliun lebih, ya saya minta maaf saya karena dapil saya harus bicara dengan fakta dan data. Tahun yang lalu dalam saya akan menggali terus data-data yang ada di Batam ya supaya bisa bicara dan mendukung karena dapil. Tahun yang lalu dalam masa Covid ya anggaran *dua koma empat empat* ya ada penambahan anggaran peningkatan anggaran Rp426 miliar, tapi yang saya apresiasi adalah target investasi. Kita melihat anggarannya begini Rp2,44 triliun ya karena ini badan perusahaan apa yang dapat dicapai dari dari anggaran yang keluar sebanyak itu, saya apresiasi begini, dalam masa Covid itu BP Batam ini menargetkan cuma berapa ya Rp19 triliun ya Pak ya?

WAKIL KEPALA BP BATAM:

25 Pak, untuk tahun 2021 Pak.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Kurang dengar Pak.

WAKIL KEPALA BP BATAM:

Untuk tahun 2021 Rp25 triliun investasi Pak.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

Tercapai 22 ya?

WAKIL KEPALA BP BATAM:

2021 belum.

F-P.NASDEM (Drs. H. NYAT KADIR):

20 yang 2020, lebih dari target 52%. Anggaran yang sudah dikeluarkan *dua koma* ya anggaran murni *dua ratus sekian miliar* ya ditambah anggaran-anggaran dari WT, pelabuhan, bandara segala macam karena artinya dengan dana *dua koma empat* tadi tercapai target investasi melebihi target dalam masa Covid *dua puluh dua koma sekian triliun*.

Jadi, sangat tepat kalau Bapak-bapak sebenarnya kita kami istilahnya Bapak-bapak Ibu Anggota DPR Komisi VI mendukung anggaran murni ini ya untuk stimulus ya kalau tak salah *lima ratus* ya cuma yang di apa kan Rp40 miliar ya Pak ya karena targetnya kalau tak salah Rp25 triliun investasi yang tercapai 2-2020 tercapai Rp22 triliun baru tidak ada salahnya BP Batam menargetkan karena ada pemulihan ekonomi pemerintah rencana pemulihan apa namanya prediksi pemulihan ekonomi pemerintah pada tahun 2022 ya kalau tak salah Rp25 triliun. Jadi sangat tepat kalau misalnya kami berharap Bapak Ketua dan Anggota DPR mendukung tambahan anggaran tadi sebanyak Rp500 miliar tadi karena itu untuk stimulus di pelabuhan ya kalau tak salah ya di pelabuhan itu, karena targetnya target investasi kalau tak salah Rp25 triliun ya.

Jadi 10 kali lipat anggaran yang digunakan BP Batam ini apakah untuk pegawai dan lain segala macamnya untuk stimulus segala macamnya yang penting ini dana yang dikeluarkan ini target yang dicapai, target yang akan dicapai itu 10 kali. Saya kira itu Pak Ketua, kita perlu dukung. Termasuk Sabang sebenarnya karena memang Sabang saya *ndak ndak* begitu paham dia hanya nambah anu aja Pak ya anggaran-anggaran yang kemarin ya pelabuhan-pelabuhan Balohan segala macam itu sedang proses sedang di ini ya tingkatkan.

Saya kira begitu Pak Ketua.

Terima kasih, agak panjang.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, Pak Tommy silakan Pak.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Terima kasih.

Pimpinan yang saya hormati,

Rekan-rekan Komisi VI yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Kepala Badan Standardisasi Nasional,

Ketua KPPU yang saya hormati,

Kepala BPKS yang saya hormati Sabang, dan

Wakil Kepala BP Batam yang saya hormati,

Beserta dengan seluruh jajaran yang hadir pada hari ini.

Mudah-mudahan saya berharap dari keseluruhan yang dipaparkan tadi terkait dengan penambahan anggaran dikabulkan oleh Kemenkeu dan prinsipnya kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung Pak karena memang tentunya kerja dari Bapak-bapak sekalian ini sangat penting sekali terkait dengan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kemudian saya pertama ingin bertanya kepada BSN dulu. Di halaman 5 yang saya baca di sini terkait dengan fasilitasi dan pembinaan UMKM ya Pak, tahun lalu juga program ini ada dan tahun ini ada lagi. Nah, kami ingin tahu Pak hasilnya dari pembinaan itu seperti apa, hasilnya seperti apa tingkat keberhasilannya seperti apa karena seperti tadi yang dikatakan oleh teman-teman bahwa yang membina UMKM ini hampir seluruh lembaga dan kementerian di Komisi VI ini semuanya membina UMKM.

Nah, saya kira kami juga perlu dapat laporannya terkait dengan hal tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, mohon dijelaskan Pak kinerja Lembaga Penilaian Kesesuaian yang menjalankan tugas dari BSN untuk mengkaji suatu produk, bagaimana BSN menerapkan bimbingan teknisnya kepada LPK binaan BSN terutama yang berada di daerah-daerah. Jadi Pak sekarang ini akibat daripada pandemi banyak hasil olahan pangan lokal atau UMKM lokal itu yang apa namanya bisa masuk dijual di gerai pasar ritel modern. Nah, ini kan artinya kalau sudah masuk ke ritel modern itu kan tentu secara produk perlu di apa namanya distandarkan kualitasnya. Nah, ini peran LPK kan saya kira cukup besar dalam hal ini.

Nah, saya ingin tanyakan bahwa bagaimana penerapan standar kesesuaian agar produk seperti itu bisa laku dan juga sesuai dengan standar pasar ritel modern. Ini artinya Pak kalau ini berjalan dengan baik kebangkitan UMKM dan produk lokal kita masuk ke ritel modern ini kan perlu didukung. Nah, saya mohon tanggapannya.

Kemudian, berikutnya saya ingin bertanya kepada KPPU atau mungkin ini saya juga ingin tahu Pak mengenai masalah *merger go to* ya meskipun menurut data yang saya punya tidak ada satu apa namanya peraturan pun yang di dilanggar oleh *merger* tersebut, tapi saya kira saya ingin tahuantisipasi dari KPPU seperti apa.

Misalkan kan kemarin nih, KPPU pernah menjatuhkan denda sebesar Rp3,3 miliar terhadap Gojek ya karena terlambat melaporkan pemberitahuan akuisisi saham PT Global Locket Sejahtera. Nah, ini kan memang seperti di Amerika tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Amin bahwa bisnis besar itu akan memakan bisnis-bisnis yang kecil karena mereka takut bisnis itu bisa tumbuh menyaingi mereka. Nah, ini perlu adaantisipasi dari KPPU seperti apa tanggapannya karena satu kejadian di Amerika itu seperti Netflix yang dibiarkan berkembang oleh Disney dan pada akhirnya Netflix lebih besar dari pada Disney. Nah, ini kan kaitannya dengan persaingan usaha Pak saya mohon tanggapannya.

Kemudian, saya ingin tanya kepada BP Batam. Dalam paparan tadi Pak perencanaan pembiayaan PNBP ada *item* operasional belanja gaji dan personal tahun 2002 disebutkan adanya belanja barang sebesar Rp138,3

miliar dan belanja jasa sebesar Rp321,3 miliar, kemudian ada lagi belanja barang dan jasa. Nah, ini sama nih lainnya sebesar Rp1,73 miliar. Nah, ini karena bahasanya hampir sama ini, nah ini mohon dijelaskan Pak perbedaan dari ketiga pengeluaran tersebut. Nah, kalau misalkan nanti bulan Juli ada *work from* Bali kira-kira ada *work from* Batam nggak Pak atau *work from* Bintan, saya kira itu terkait dengan BP Batam.

Dan yang terakhir saya ingin tanya kepada Kepala BPKS Sabang. Dalam fokus pembangunan dan pengembangan Sabang tahun 2022 disebutkan adanya program komersialisasi aset-aset BPKS dalam usaha meningkatkan investasi pada sektor prioritas kepelabuhan, pariwisata, pemanfaatan aset, jasa, dan infrastruktur.

Kira-kira apa langkah yang akan dilakukan oleh BPKS untuk mewujudkan hal tersebut? Mungkin ya Pak mungkin memungkinkan nggak kira-kira misalkan BPKS mengadakan *event* skala internasional di sana tujuannya untuk sekalian promosi dan menarik minat pendatang di Sabang sendiri karena kan wisata di Sabang itu sangat indah, sangat luar biasa dan di sini ada program Bapak bahwa akan mengembangkan dari sektor pelabuhan dan pariwisata. Saya kira kalau memungkinkan mungkin bisa dipikirkan Pak agar Sabang bisa lebih maju, bisa lebih hebat nanti kalau *event* internasional itu berhasil nanti akan muncul lagi *resort-resort* yang ada sehingga nanti secara perkembangan ekonominya bisa lebih baik.

Saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan Pak Deddy.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-bapak dari KPPU, BSN, Sabang, Batam saya kira kalau dari sisi anggaran ya ini signifikan, kalau menurut saya Pak ya semua. Tapi, oleh karena itu, justru saya ingin bertanya, apa sih yang berbeda dibanding anggaran tahun lalu atau ini hanya *the same* apa namanya *more less the same* aja anggaran tahun lalu, anggaran tahun ini gitu ya mungkin tambah dikit Insyaallah berhasil ya kalau nggak pun nggak apa-apa kembali data yang lalu misalnya.

Saya hanya ingin kita menjadi lebih, saya ingin apakah ada yang terpikir oleh Bapak-bapak semua sesuatu yang menjadi fokus dari masing-masing lembaga pada tahun ini baik secara anggaran maupun kebijakan, jadi bukan sesuatu yang rutin aja setiap tahun kita lakukan ya begitu-begitu aja. Jadi, dari masing-masing saya minta sebenarnya fokusnya apa sih sehingga tahun depan kita bisa bicara oh ini tercapai sebenarnya ini akan lebih baik kalau kita kita begini maka perlu kita perjuangkan anggaran begini karena kan

harusnya anggaran itu kan cara mencapai mimpi kan, mimpinya apa sih sebenarnya? Apa yang akan berbeda kita lakukan pada anggaran tahun ini, sehingga tahun depan kita bisa bicara meningkat Pak jadi bukan sesuatu yang biasa aja karena kalau saya lihat ini semua kan ya relatif begitu-begitu saja gitu ya, nah yang pertama.

Yang kedua BSN. Pak, saya mendapat banyak keluhan soal sertifikasi bahkan menteri pun apa namanya mempertanyakan misalnya bagaimana orang melakukan resertifikasi aja susahnya minta ampun, komunikasinya jelek, tidak ada progres yang bisa saling nih bayangin 2 menteri ini minta tolong ke kita ini gimana sih ada orang minta dibantu tapi *nggak* jelas nih penyelesaiannya misalnya.

Oleh karena itu, nanti saya mohon perhatiannya Pak dan ini saya kebayang kalau menteri aja minta tolong sama kita bagaimana rakyat biasa Pak, bagaimana pengusaha kecil kita bisa menembus BSSN ini eh BSN ini gitu. Jadi, mohon perhatiannya Pak ya supaya ini benar-benar menjadi lebih baik karena kalau dari anggaran saya lihat untuk program Standardisasi Nasional hanya Rp69 miliar mau ngapain sih bangsa ini ya padahal kita bicara standarisasi itu sudah puluhan tahun gitu ya kenapa hanya dengan anggaran segini, apakah memang karena bangsa ini masih melulu hanya jual komoditas sehingga yang namanya manufaktur kita itu atau yang lain teknologi dan sebagainya itu *nggak* berkembang Pak. Nah, oleh karena itu, saya kira Bapak-bapak jangan terjebak pada rutinitas dong, mari bicara dengan para pemangku kepentingan bicara RPJMN dan sebagainya, harus proaktif Pak bangsa ini mau dibawa ke mana saya kira itu bagian dari usaha Bapak juga.

Termasuk KPPU Pak ya. KPPU kalau saya lihat di sini kan ya data sama yang saya malah bingung nih yang kepaniteraan, kepaniteraan tuh maksudnya Pak proses pengadaan apa namanya gelar perkaranya ya, persidangannya, makanya dia lebih besar sampai *lima koma enam* dibandingkan misalnya penindakan atau investigasi memang di sana dananya yang lebih besar, oh karena harus itu ya, iya, oke. Jadi, lagi-lagi Pak sebenarnya banyak yang menggantungkan harapan ke Bapak-bapak supaya terjadi memang persaingan usaha yang sehat Pak, cuma kan misalnya untuk di yang berperan di apa namanya di APBN kita misalnya kan tahu kita tidak berani ngadu padahal banyak kecurangan dalam proses pengadaan dan sebagainya karena takut nanti *nggak* dapat lagi padahal sampai mampus pun *nggak* dapat.

Ini *problem* Pak. Jadi, saya berharap kita bisa proaktif Pak proaktif mungkin apa namanya istilahnya *sampling* aja pak di PU Pera, di perhubungan, di informatika di mana begitu Pak sehingga kita bisa terus menerus memberikan masukan dan perbaikan Pak. Jangan udah KPK baru kita pada geheran karena preventif itu juga sangat penting Pak belajar dari kasus per kasus gitu Pak, ini kasihan sekali karena biasanya dalam hal seperti ini kita sama-sama tahulah kalau sudah punya orang dalam selesailah itu urusan yang lain yang nontonlah paling jauh dapat *subcon* atau apa misalnya kan gitu Pak. Ini juga mohon bantuan Bapak di KPPU untuk melakukan itu juga Pak memberikan masukan, memberikan penguatan terhadap perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa di di kita Pak, ini

penting sekali saya kira. Kalau mau bicara masalah banyak banget Pak. Tapi, kan kita tidak cari-cari masalah.

Oleh karena itu, kita berharap tahun depan ada pekerjaan yang serius untuk mengidentifikasi di mana sih kelemahan kita dalam persaingan usaha terutama untuk melindungi pengusaha-pengusaha kita supaya juga pemerintah jadi lebih efisien Pak karena kalau tetap ada yang namanya lingkaran-lingkaran itu Pak *nggak* pernah efisien Pak akhirnya bahkan kadang-kadang malah jadi kanibal, orang nawar proyek infrastruktur 72% mau kerja apa, kan bingung juga kita. Ini sebenarnya apa namanya APS-nya gimana sih orang bisa nawar 68, 72 lah itu apa gitu loh. Ini untuk yang seperti ini saya kira KPPU telinganya harus lebih lebih apa namanya lebih sensitif Pak ya supaya dia lebih bersifat sistemik kita bicaranya jangan *case per case* ya.

Lalu yang Sabang Pak kami menanti Pak terobosannya Pak, apa yang bisa kalau lihat anggarannya kan Pak ya ini gimana ya Rp71 miliar untuk satu kawasan industri kan Bapak bisa duduk di situ kerja *nggak* ada yang ini karena *nggak* ada gaji udah syukur. Oleh karena itu, saya kira Pak ya harus berpikir *strategic* investorlah Pak fokuslah apa sih kita mau kembangkan di situ, carilah orang saya kira di terlebih di situasi pandemi ini Pak banyak uang mati Pak kan tergantung kita bagaimana mencari sumber-sumber yang jelas dengan apa namanya usulan bisnis yang baik, saya kira tidak ada masalah untuk mencari mencari investor.

Demikian juga Batam Pak walaupun sudah melebihi saya kira orang belajar dari apa namanya dari pandemi ini ya bahwa kayak Singapura misalnya ya Singapura itu Pak *nggak* mungkin dinaikin lagi Pak pertumbuhan ekonominya sudah *minus* terus bahkan sebelum pandemi. Nah, peluang ini kita tangkap *nggak*. Kita tahu dulu Hongkong bergejolak uang lari dari sana ke Singapura tapi *nggak* milih Batam Pak, milih Vietnam, milih Thailand, kenapa padahal Batam itu hanya sepelemparan senyum Pak dari Singapura, kenapa *nggak* lari ke kita, apa sih masalah sebenarnya duduk perkaranya. Kita berharap tahun depan Pak dengan anggaran yang ada ini kita mau hal-hal yang visionerlah Pak supaya kita benar-benar *pasca* pandemi punya alasan untuk meminta kepada Kementerian Keuangan kepada Pemerintahan Pak Jokowi untuk memberikan anggaran yang lebih Pak karena kita sudah siap. Kalau ini kan saya kira masih hanya nerusin yang kemarin-kemarin ya, *out of the box* terobosan. Saya kira itu yang kami tunggu Pak dari Bapak-bapak semua.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, penanyanya sudah habis.

Silakan Pak Nyoman.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Pimpinan ada dua hal.

Yang pertama kepada BSN karena kawan terdahulu sudah bertanya urusan UMKM. Dalam Undang-Undang Ciptaker tidak tidak dijelaskan tentang klasifikasi UMKM-nya, tapi menyangkut tentang risiko rendah, risiko tinggi. Itu nanti mungkin Bapak bisa jelaskan menyambung pertanyaan teman lebih awal tadi. Jika, ada 400 UMKM yang akan difasilitasi dan diberikan pembinaan kalau dirasionalkan memang hampir 330 juta itu nanti jenis, karakter, kondisi UMKM-nya seperti apa itu Pak? Itu satu.

Yang kedua di atasnya itu saya ingin bertanya karena Bapak ada dana yang cukup besar 22 M untuk pengadaan alat laboratorium SNSU. Nah, jika ini sudah ada saya berharap pasti ini penting jika nanti ini sudah ada apa yang ingin apa yang akan didapatkan oleh oleh masyarakat yang ingin mendapatkan standardisasi? Kenapa alat yang Bapak anggaran yang cukup besar alat ini menjadi begitu penting. Itu yang pertama.

Yang kedua untuk KPPU Pak. Dalam pagu anggaran 2021 maupun disandingkan dengan anggaran tahun 2022 saya melihat apa namanya ini seperti dibuat rutin begitu. Contoh misalnya dalam lembaran 2 ya Pak dengan anggaran Rp1.853.500.000,- itu untuk 10 perkara dugaan pelanggaran, selanjutnya dengan naik sedikit dengan dengan pagu anggaran 2.053.000.000,- itu dengan target juga 10 perkara, begitu juga bentuk ke bawahnya baik yang 1 perkara inisiatif, 7 perkara dalam dalam kurun penyelidikan.

Yang saya ingin tanyakan karena tahun lalu juga ini ada, setelah Bapak lakukan ini 10 perkara dugaan pelanggaran apa belum terbentuk budaya budaya bisnis yang baik Pak sehingga 2021 Bapak menargetkan segitu, tahun 2022 sama lagi sama lagi jadi manfaat dari Bapak melakukan itu baik yang dugaan pelanggaran bahkan Bapak melakukan perkara yang diinisiasi langsung oleh KPPU, ada 7 perkara yang masih dalam penyelidikan, ada 1 perkara yang dalam target pemberkasan, ada 4 perkara dalam penuntutan dan 3 perkara dalam litigasi. 2022 juga hampir sama polanya, cuma anggarannya ada naik-naik lagi sedikit. Dalam konteks itu apa sesungguhnya masalahnya banyak tapi anggarannya anggaran yang tersedia sedikit Bapak hanya menargetkan segini, itu satu pertanyaan saya. Yang kedua karena sama bentuknya, polanya sama, bahkan jumlah yang di yang diperkarakan juga sama itu itu karena uangnya yang sebatas itu apa Bapak memang punya target gitu dalam setahun, tahun lalu 3, tahun 2022 3, jadi nanti tahun 2023 3 juga, apa seperti itu polanya coba ini dijelaskan Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Saya rasa dari penanyanya sudah kita beri kesempatan, oh ada satu yang dari virtual Ibu Melani. Ada?

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Ada Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke silakan.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman anggota Komisi VI,
Yang saya hormati Kepala BP Batam pada**

KETUA RAPAT:

Ibu mungkin suaranya bisa dideketin atau ini biar, agak kecil suaranya.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Oke, iya. Terima kasih Pimpinan. Udah kedengaran belum? Sudah?

KETUA RAPAT:

Ya, lebih baik dari tadi sih, tapi masih kecil.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Terima kasih. Tadi saya sudah terima kasih pada yang saya hormati Pimpinan Komisi VI, Anggota Komisi VI.

Yang saya hormati Kepala BP Batam, BP Sabang, dan Kepala KPPU, dan Kepala BSN beserta jajarannya semua.

Saya hendak menanyakan ke tergantung anggaran tentunya saya setuju aja untuk ada kenaikan ya karena dalam pandemi ini mungkin perlu terobosan-terobosan dan anggarannya harus juga cukup untuk melaksanakan terobosan-terobosan itu.

Dan saya hendak ke KPPU dulu. Saya di sini apresiasi kepada KPPU atas kinerjanya sehingga 72% putusan KPPU yakni 168 putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga jumlah ini berada di atas target yang ditetapkan yakni sebesar tadinya 62% dan berkontribusi pada pendapatan negara hingga Rp860 miliar khusus bagi tahun 2020 total realisasi pendapatan negara dari denda persaingan usaha yang telah mencapai Rp35,9 miliar. Nah, saya hendak juga menanyakan ke KPPU apakah masih ada sosialisasi untuk di dapil saya di Dapil DKI 2 yaitu Jakarta Pusat dan Selatan, kalau masih ada mungkin bisa diprogramkan untuk karena banyak sekali dari UKM-UKM di dapil saya itu yang mungkin bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar ya terutama yang di mall.

Nah, bagaimana mereka juga kadang-kadang mendapatkan lokasinya tidak sesuai karena tergantung lokasinya, bagaimana barang yang di yang dipamerkan itu bisa diminati oleh para yang pengunjung ya, tapi kalau lokasinya juga terpencil atau tidak menarik para UKM itu juga susah untuk

mempromosikan barangnya. Saya juga mengharapkan agar KPPU juga ingin menanyakan kesuksesan atau sukses *story success story* dari pengusaha yang kecil yang berhasil apa namanya di daerah saya di Dapil DKI 2 itu yang berhasil memenangkan mungkin gugatannya ke pengusaha besar. Apakah ada *success story*-nya mungkin bisa disampaikan sehingga itu bisa menjadi percontohan untuk konstituen saya para UMKM yang lainnya.

Kemudian kepada BSN saya juga ingin menanyakan sertifikasinya itu apakah yang yang termasuk untuk yang tidak berisiko itu yang misalnya untuk apa ya permainan anak gitu, kalau permainan anak mungkin kan nanti kalau digigit-gigit dengan anak kecil atau bayi itu bisa mengakibatkan misalnya jadi keracunan atau sebagainya itu mungkin yang termasuk yang berat ya bukan yang ringan-ringan. Jadi, yang ringan-ringan bisa dikasih contoh dari BSN-nya karena kita juga ingin mendapatkan sertifikasi dari BSN untuk produk-produk UKM dari Dapil DKI 2 di Jakarta.

Kemudian BPKS Sabang. Saya harap ada terobosan-terobosan mungkin dari wisma-wisma wisatawan mancanegara mungkin susah (***suara tidak jelas***) tapi dari wisnus Wisata Nusantara karena saya lihat waktu itu saya pernah juga datang ke Sabang itu sebenarnya kalau dikelola itu pemandangannya sangat indah sekali dan juga kita akan dapat sertifikasi sertifikat bahwa kita telah mengunjungi kawasan yang zero nol ya titik nol. Nah, itu juga menarik juga ya karena kan apalagi yang senang berwisata senang sekali kalau mendapatkan udah pernah gitu di titik nol dari Indonesia di Sabang, nanti dia tinggal ke mengunjungi Merauke ya Merauke titik nol dari daerah Timur nah itu.

Tetapi saya lihat indah sekali sebenarnya kemarin waktu itu saya lihat banyak perumahan-perumahan atau *cluster-cluster* yang dikelola oleh orang-orang Jepang, saya mau menanyakan apakah itu masih ada atau sekarang mereka yang Jepang sudah mengalihkan ke apa namanya ke pengusaha Indonesia atau masih mau (***suara tidak jelas***) Jepang tapi mungkin kolaborasi karena saya juga pernah makan di situ ada restoran yang enak sekali dan indah pemandangannya tetapi yang mengelola orang lokal. Nah, itu bagaimana sekarang ini dengan situasi pandemi, apakah masih masih ada ya karena kan sekarang hotel, restoran pada tutup semua, gimana dengan Sabang di daerah Sabang.

Kalau Batam seperti tadi teman-teman katakan bahwa tadi sekarang ini karena Singapura mungkin juga susah masuk ke sana mungkin dari wisatawan lokal ya yang bisa masih datang ke Batam karena di Batam itu tentunya banyak kuliner-kuliner atau hal-hal yang saya rasa menarik juga untuk dipromosikan.

Mungkin itu saja dulu Ketua.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. / F-PG):

Wa'alaikumsalam.

Bu Melani, terima kasih.

Rekan-rekan sekalian,

Rupanya apa di selain daripada rapat anggaran banyak teman-teman mengkritisi juga tentang kinerja, untuk itu mungkin dijawabnya barangkali singkat-singkat aja karena waktunya juga dan kita jam 2 ada rapat lagi dengan Menteri Investasi sehingga apa waktu kita cukup *mepet*. Saya pun bergantian makan siangnya mungkin Bapak-bapak juga belum makan siang, nanti kalau agak kelamaan Bapak-bapak jawabnya sama juga akhirnya mengganggu anu Undang-Undang Kesehatan terganggu Pak. Jadi begitu, silakan Pak dijawab ya mulai dari tadi mulai awal dari, oh dari Sabang katanya biar dari Sabang sampai Merauke aja katanya. Silakan BPKS.

KEPALA BPKS SABANG:

Terima kasih Bapak.

Senang di sini Pak bisa saya sampaikan apa sebenarnya yang terjadi di Sabang gitu ya. Pertama 1 Pak Deddy, kemudian Pak Kurnia, kemudian Ibu dari Melani, Pak Tommy, Pak Hakim ya.

Pertama regulasi yang ada Undang-Undang Sabang itu dikalahkan oleh Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020 iya. Sabang saya sebagai Kepala BPKS mempunyai *authority* yang besar Pak untuk mengajukan Sabang, tapi *authority* itu hilang di tengah jalan. Contoh 1 gula hari ini di Sabang itu Rp14.000 per kg, kita bicara fakta Pak, kenapa saya di tahun anggaran ini saya nggak minta uang supaya DPR nanya ke saya kenapa kamu nggak kerja Iskandar bisa *nggak* kerja keluar dari *pattern* yang ada? Hari ini Sabang satu sendok aja nggak boleh masuk impor gula, otorisasi saya sebagai Kepala BPKS hilang, *that is doesn't make sense*.

Saya malah kembali bertanya ke DPR ke KPPU kenapa bisa terjadi Sabang seperti ini? Seandainya regulasi itu diberikan ke saya APBN, BPKS sebagai BLU saya akan meng-*create* sesuatu, pemerintah hanya memberikan. Kenapa saya tidak minta uang tambahan? Saya minta, BUMN hadir untuk Sabang di sana, saya *nggak* perlu dikasih uang, kalian buat hotel, BUMN punya uang banyak, kenapa harus kerja *work from* Bali? Kenapa nggak judul lagu aja dari Sabang Pak bukan dari daerah lain. Kita harus keluar dari *pattern* yang ada, Sabang tuh bagian dari NKRI, Indonesia bukan Mandalika, Bali, Bitung, Toba tapi Sabang hadir.

Bisa kita *start* lagi? Oke. Kemudian saya minta kepada DPRRI Komisi VI memanggil Menteri Perdagangan menanyakan kenapa Undang-Undang Nomor 14 itu berlaku termasuk Sabang, seharusnya Sabang beda dengan pelabuhan Indonesia lainnya. Saya sudah mengirimkan surat ke Lemhanas untuk dilakukan *review* kenapa Undang-Undang Sabang kalah dengan peraturan menteri?

Kedua, kebutuhan komoditi. Jarak antara Belawan ke Sabang itu 650 km dengan waktu tempuh itu 13 jam dengan kecepatan kapal 23 knot. Kebutuhan gula komoditi yang ada untuk Aceh semua diturunkan di Sabang, distribusi dari dari distribusi di Belawan distribusi dari Belawan masuk ke Aceh per kg itu Rp1.000 kenapa tidak dimanfaatkan Sabang sebagai *Free Trade Zone* itu dihidupkan sehingga harga lebih murah. Saya bisa jual sebagai Kepala BPKS seandainya di tadi ditanya, kenapa nggak maju Sabang? Saya bisa menjual gula di Sabang dengan harga Rp11.000,-. *Lost opportunity* masyarakat Sabang sebagai *Free Trade Zone* itu Rp3.000 per kg dan ini sudah saya buat Surat 7 Desember 7 September tahun 2020 saat saya baru dilantik 7 hari, itu pertama kali saya *review*. Saya minta kebutuhan gula Aceh sebesar 25.000 ton kalau dikali Rp1.000 itu Rp25 miliar, kenapa tidak diturunkan di Sabang sebagai *Free Trade Zone* sedang Belawan bukan *Free Trade Zone*.

KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. / F-PG):

Oke, kami dapat nangkap maksudnya. Silakan yang lain Pak.

KEPALA BPKS SABANG:

Yang kedua, apakah APBN, APBN harus tetap dibantu Sabang. Kemudian pengembangan aset. Tadi ditanya Pak ya aset ya kita banyak Pak aset, saya punya pelabuhan sebesar 1,3 triliun dengan kedalaman laut 22 meter *minus*, kapal bisa masuk 200.000 meter 200.000 *deadweight ton* tapi satu kapal pun *nggak* ada yang masuk, lintasan Sabang sebesar yang dimanfaatkan laut adalah sebesar 173.000 kapal 1 kapal pun *nggak* bisa masuk karena regulasi tidak memihak ke Sabang. Saya minta Menteri Perhubungan untuk membuat Sabang sebagai *emergency call* untuk masuk kawasan Indonesia melalui Sabang, kalau ada *emergency call* orang masuk dari gerbang nasional Sabang *nggak* ada Pak.

Kemudian untuk Ibu Melani, pariwisata di Sabang Ibu kita harus membatasi orang, kapal yang *passenger*-nya 203 *passengers* 1 kapal kita buat 50 sama *distance* untuk prokes. Yang datang ke Sabang cukup banyak, kita harus membatasi.

Terima kasih Bapak itu aja dari saya. Mudah-mudahan ada gambaran dari Sabang bisa lebih baik ke depan. Terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. / F-PG):

Silakan sekarang ke BSN Pak dari awal lagi.

KEPALA BSN:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kepada BSN tentu untuk perbaikan kinerja BSN.

Yang pertama dari yang terhormat Pak Amin tadi terkait dengan permintaan tambahan anggaran untuk pembinaan UMKM sebanyak Rp412 miliar itu apakah sudah teridentifikasi. Sebenarnya pembinaan UKM dalam konteks ini adalah untuk memenuhi amanah PP 7/2021 terutama itu ada forum koordinasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian KUKM dan tata cara pengajuan perizinannya suatu UMKM melalui OSS yang dikoordinasikan oleh Kementerian Investasi BKPM.

BSN tentu mempunyai peran karena peraturan pemerintah itu berbunyi ketika suatu Usaha Mikro dan Kecil tidak termasuk menengah masuk kategori risiko rendah, maka ketika mendapatkan Nomor Izin Berusaha dari OSS di BKPM harus juga langsung mendapat tanda SNI dan tanda halal. Dan sudah disepakati nanti kalau ada permintaan itu maka BKPM akan mem-forward UMKM-UMKM atau UMK terutama Mikro dan Kecil yang sudah mendapat Nomor Izin Berusaha sehingga yang kami rencanakan di tahun 2022 Rp12 miliar itu adalah untuk 400 UMKM yang masuk melalui OSS di BKPM. Kemudian yang kedua terkait dengan peralatan penambahan anggaran untuk peralatan Lab SNSU tadi pertanyaan Pak Amin apakah di pusat atau di daerah. Jadi, kita hanya punya satu lab di pusat Pak Amin di Puspitek Serpong fungsi dari laboratorium ini adalah sebagai laboratorium referensi yang apa keakuratan pengukurannya tertinggi di Indonesia.

Kemudian dari Pak Subardi menanyakan terkait dengan komposisi anggaran Dukungan Manajemen dan Program Standardisasi itu sendiri yang saat ini lebih besar Dukungan Manajemennya dibanding program kegiatan Standardisasinya. Jadi, sebetulnya Pak Subardi usul BSN yang awal adalah kita mengusulkan Rp346 miliar, kemudian pagu indikatif turun Rp219 miliar.

Ketika kemudian kita mengetahui dalam pagu indikatif tadi sudah dihitung persentase oleh Pak Subardi persentase dukungannya lebih besar, maka kita sebenarnya menanyakan apakah bisa di diperbaiki komposisinya tetapi itu adalah kebutuhan minimal Dukungan Manajemen itu adalah untuk gaji, operasional yang notabene sekarang BSN sejak tahun 2018 mendapat tugas baru untuk mengelola laboratorium yang namanya Standar Nasional Satuan Ukuran yang tadinya ada di LIPI karena bentuk-bentuk yang kita sebut sebagai *National Quality Infrastructure* atau infrastuktur multinasional itu umumnya hampir di semua negara menjadi satu di atas Badan Standardisasinya. Dan kita otomatis biaya untuk operasional itu menjadi lebih besar karena awalnya kita tidak mempunyai aset laboratorium di di Serpong sekarang kita mempunyai 2 laboratorium yang cukup besar di sana yang harus juga kita kembangkan sebagai laboratorium referensi.

Kemudian dari Pak Abdul Hakim mungkin tadi sama pertanyaan terkait dengan Rp12 miliar, metodenya seperti apa nanti untuk 400 UMK kita akan terintegrasi dengan BKPM dan Kementerian KUKM. Jadi, memang Pak hampir atau banyak kementerian dan lembaga yang berurusan dengan UMKM terutama UMK, tetapi tentu sekarang sudah diintegrasikan oleh Kementerian KUKM sehingga kalau urusannya terkait dengan pengenalan

standar kepada UMK maka itu BSN yang diberi tugas. Kemudian tentang kerja sama laboratorium, tadi dari Pak Abdul Hakim juga. Sebetulnya sistem standardisasi nasional sekarang laboratorium yang digunakan untuk menguji atau mensertifikasi produk atau barang yang beredar itu bukan milik BSN, jadi BSN justru mengawasi laboratorium-laboratorium. Jadi,, tentu kita bekerja sama, jadi angka terakhir BSN pada hakekatnya mendapat tugas untuk memastikan kompetensi laboratorium itu melalui akreditasi, sampai akhir Mei kemarin 1.500 Laboratorium Penguji Indonesia sudah diakreditasi mereka ada yang milik pemerintah, milik BUMN, maupun milik swasta.

Kemudian terkait dengan Dukungan Manajemen, Peningkatan SDM, Humas, Sistem Informasi kenapa namanya peningkatan. Sebenarnya itu anggaran pokok untuk kegiatan peningkatan SDM di BSN, tetapi memang nomenklatur pada saat kita berbicara dengan Bappenas maupun Kementerian Keuangan diberi kata di awal Peningkatan. Jadi, itu anggaran rutin untuk pemeliharaan kompetensi SDM di BSN, kegiatan kehumasan, dan pengelolaan sistem informasi yang pada saat sekarang tidak mungkin tidak kita kelola dengan baik.

Dari Pak Nyat Kadir, sosialisasi. Jadi, kita lakukan sebenarnya cukup gencar juga dan sekarang kita memandang sosial media juga cukup efektif digunakan alat atau sebagai alat untuk sosialisasi dan kita juga mengelola sosial media seperti *Instagram*, *Facebook*, dan juga tentu *website* BSN yang selalu *update* setiap hari memberikan informasi kepada masyarakat SNI terbaru apa yang baru ditetapkan dan sebagainya. Kemudian biaya sertifikasi SNI mahal, memang ini masih menjadi permasalahan kita bersama. Tetapi khusus untuk usaha mikro dan kecil yang risikonya rendah undang-undang memerintahkan itu tidak tidak membayar. Jadi, nanti kita akan mulai mempresentasikan dan dikoordinasikan oleh BKPM melalui OSS nanti.

Dari Pak Tommy Kurniawan, menanyakan hasil pembinaan UMKM selama ini dari tahun ke tahun seperti apa. Jadi, kita Pak Tommy mungkin sekitar 5, 6 tahun terakhir kita mulai membina UMKM tetapi karena keterbatasan *resources* yang kita lakukan membuat percontohan-percontohan yang harapannya dicontoh oleh klaster UMKM yang sejenis. Sudah 770-an UMKM yang kita bina dan memang karakter UMKM tidak juga semua kemudian sadar menerapkan SNI-nya, ada yang kemudian sukses menerapkan SNI bahkan sukses produknya diekspor sehingga kita selalu adakan semacam *talk show* secara rutin kita undang UMKM yang sukses untuk bercerita ke kawan-kawannya kira-kira seperti apa sehingga mereka bisa bisa sukses bisa mendapatkan keuntungan bahkan produknya bisa di bisa diekspor.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Izin Pimpinan.

Kayaknya bisa itu Pak bisa apa namanya jadi konten *YouTube* saya tuh Pak *success story*-nya UMKM Pak, biar biar biar masyarakat makin banyak yang tahu Pak contohnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. / F-PG):

Selebgram ini Pak. Jadi selebgram Pak Tommy Kurniawan ini selebgram Pak, kalau masuk ke dia itu ratusan ribu yang baca nih Pak.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Pimpinan izin juga. Pimpinan sedikit.

Disambung, jelaskan solusi turunan PP 28/2021 tentang keharusan mengambil barang mainan di luar negeri, itu kan bisa menghentikan impor Pak itu.

KEPALA BSN:

Baik, terima kasih Pak Darmadi nih. PP 28 sebenarnya pemain utamanya adalah Kementerian Perindustrian, BSN tentu tugasnya *support* apa-apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Perindustrian untuk mengeksekusi itu. Tapi, mohon izin kalau diperbolehkan Pak Deputi yang terkait bisa.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Pandangannya ini kan ngambil contoh *sample*-nya itu kan harus tenaga dari Indonesia harus ke luar negeri, sementara di sana banyak *lockdown* *nggak* bisa masuk, untuk sampai sana dikarantina itu harus 3 minggu. Nah, ini kan membahayakan jadi menghambat impor gitu nanti mohon dijelaskan Pak.

KEPALA BSN:

Biar tidak lupa mohon izin Pak Pimpinan Pak Deputi menjelaskan.

KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. / F-PG):

Silakan, silakan jelaskan secara singkat Pak ya jamnya juga ini, ini masih ada 4.

DEPUTI BSN:

Izin Pak Darmadi. Jadi ini memang sedang kami diskusikan dengan Pak Dirut terus menerus Pak terutama yang harus mengambil ke sana 3 minggu itu, nanti saya kontak Bapak langsung ya mohon izin.

KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. / F-PG):

Iya.

KEPALA BSN:

Baik.

Kemudian tadi pertanyaan Pak Tommy juga bagaimana peran Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk mendorong agar UMK naik kelas sehingga bisa memenuhi persyaratan pasar terutama ritel *modern*. Ini juga yang kita lakukan pada saat pembinaan karena sekarang di pasar ritel juga sudah banyak yang mensyaratkan dipenuhinya Standar Nasional Indonesia terutama produk-produk yang Standar Nasional Indonesia-nya tidak diwajibkan, kalau yang wajib pasti harus ber-SNI.

Dari Pak Deddy Sitorus. Terima kasih Pak jadi pertanyaannya, apakah apa yang berbeda anggaran dengan tahun lalu? Jadi, memang karakter unit Eselon I di BSN itu ada yang mau tidak mau sebagian besar mungkin pekerjaan rutin karena tugasnya melakukan akreditasi terhadap laboratorium misalnya, jadi dia semata-mata meningkatkan kualitasnya dan meningkatkan *volume*-nya. Kemudian ada juga kedeputian yang sifatnya harus merespon perubahan di pasar, jadi ketika ada pertanyaan apa yang yang berubah terutama fokusnya maka tentu kita deputi yang merumuskan SNI tentu merespons langsung apa yang jadi kebutuhan-kebutuhan pasar. Oleh karena itu, di dalam kita menyusun SNI memang kebutuhan pasar menjadi pertimbangan kita yang utama di samping juga kemampuan industri dalam negeri karena kita tidak tak tidak ingin juga menyusun Standar Nasional Indonesia yang tidak bisa diterapkan sendiri oleh industri kita di Indonesia.

Kemudian sertifikasi dan tren sertifikasi sulit, tadi Bapak bahkan menyampaikan ada 2 menteri yang bertanya ke Pak Deddy mungkin. Jadi, sebetulnya sejak BSN didirikan Pak Deddy didesain di Indonesia itu Badan Standar tugasnya itu menyusun standarnya, menyusun persyaratannya, yaitu SNI. Kemudian sertifikasi dan pengujian dilakukan oleh laboratorium atau Lembaga Sertifikasi di luar BSN, tetapi harus di akreditasi oleh BSN melalui Komite Akreditasi Nasional.

Jadi, memang pengawasannya menjadi dua lapis karena BSN tidak langsung BSN tidak melakukan sertifikasi, tidak mengeluarkan tanda SNI, tetapi BSN mengawasi lembaga-lembaga yang menerbitkan tanda SNI gitu kita sebutnya melalui akreditasi. Dan saya rasa pertimbangan yang utama pada saat BSN didirikan dengan cara seperti itu karena ada negara lain yang caranya badan standardisasinya melakukan sertifikasi karena *coverage* atau cakupan wilayah laut teritorial Indonesia yang begitu luas sehingga waktu itu dipilih BSN mengawasi lembaga-lembaga yang menguji maupun mensertifikasi. Jadi, tentu masuknya terima kasih kalau sekarang masih ada kesulitan biasanya kita biasanya rutin sangat sering Pak Deddy kita berkomunikasi dengan laboratorium, Lembaga Sertifikasi yang mereka tugasnya melakukan sertifikasi SNI, komplain-komplain dari masyarakat kami sampaikan kepada mereka.

Kemudian dari Pak Nyoman, kegiatan usaha yang berbasis risiko tadi UMK seperti apa untuk tambahan 400 UMK tadi. Jadi, sebenarnya sudah saya jelaskan tadi Pak karena kita ini terintegrasi dengan program yang ada di Kementerian Investasi BKPM dan Kementerian KUKM. Kemudian kalau

Rp22 miliar untuk Lab SNSU sudah sudah diberikan apa dampaknya tadi pertanyaan Pak Nyoman.

Jadi, sebetulnya ketika BSN mendapat tugas pengelola laboratorium SNSU sebagai laboratorium referensi kita memerlukan tambahan peralatan yang kita estimasi sekitar 4 eh Rp200 miliar, kemudian pembicaraan BSN dengan Bappenas terutama kita disarankan untuk mengajukan Rp40 miliar tiap tahun selama 5 tahun, ini sudah tahun ke-2 tahun kedua jadi kita akan berakhir 2024 atau 2025, jadi apa kira-kira dampaknya? Jadi sekarang terutama Lab SNSU ini tugasnya memastikan akurasi hasil pengukuran laboratorium di Indonesia Pak karena kan kalau hasilnya tidak akurat, produk sudah diuji, sudah disertifikasi, kita ekspor kadang negara pembeli bertanya diuji di lab mana dan sebagainya dan itu *gap*-nya sudah kita potret kira-kira memerlukan Rp200 miliar.

Jadi, tetapi kita tentu bertahap, jadi ada beberapa pengujian yang sekarang sudah bisa dilakukan sendiri di Indonesia, dampak yang paling sederhana barangkali nanti sedikit demi sedikit kita mengurangi ketergantungan harus menguji atau harus mengkalibrasi di laboratorium di luar negeri Pak, itu dampak yang paling signifikan harapannya bisa bisa lebih baik di Indonesia.

Kemudian, dari Ibu Melani yang secara virtual Ibu terkait dengan sama sertifikasi risiko, mainan anak bagaimana? Kalau mainan anak karena SNI-nya sudah diwajibkan dari filosofinya berarti mainan anak itu memang risiko tinggi terhadap anak-anak sehingga tetap harus mengikuti aturan peraturan menteri tentang mainan anak. SNI wajib untuk mainan anak. Tapi, banyak produk UMKM yang menurut BSN masuk dalam kategori risiko rendah yang nanti akan kita arahkan untuk langsung mendapatkan SNI ketika mereka mengajukan NIB melalui OSS. Ini sedang kita tawarkan konsepnya ke teman-teman di Kementerian Investasi dan BKPM karena mereka *focal point* untuk OSS gitu.

Saya rasa Bapak Pimpinan pertanyaan pada BSN.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Izin Pimpinan, izin Pimpinan.

Mau menanyakan tadi untuk standardisasi kalau mainan anak ya tadi sudah dijawab, cuma kalau misalnya produk kayak Batik gitu kalau Batik itu termasuk risiko tinggi apa rendah karena kan pakaian.

Terima kasih.

KEPALA BSN:

Mohon izin Pak Deputi yang menjawab ya Bu, Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. / F-PG):

Iya silakan, singkat Pak.

DEPUTI BSN:

Jadi mohon izin, untuk selain untuk risiko selain dari risikonya sendiri kami juga memperhitungkan skala. Jadi berdasarkan analisis bersama dengan Kementerian Perindustrian karena skala ekonominya kecil, variasinya kecil, Batik untuk pelaku usaha mikro kami kategorikan ke rendah Bu.

KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. / F-PG):

Oke terus? sudah cukup ya.

KEPALA BSN:

Cukup Pak.

KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. / F-PG):

BSN cukup. KPPU.

KEPALA KPPU:

Terima kasih Pimpinan.

Izinkan untuk menjawab ada Pak Wakil Kepala juga Wakil Ketua mohon maaf Pak Guntur dan Pak Sekjen mungkin nanti bisa membantu.

Terhadap pertanyaan dari Pak Amin izinkan Pak saya menjelaskan masalah rangkap jabatan ini memang isu yang sudah lama, kenapa baru sekarang? Memang ini pertanyaan yang sulit, itu mungkin tergantung dari kebijakan dari komisi.

Terkait kemajuannya sampai dengan sekarang kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman terutama Pak Menteri BUMN dan sudah sepakat untuk merubah merevisi. Sebetulnya masalahnya di awalnya adalah dulu mungkin tidak menjadi masalah karena tidak muncul di media. Yang kedua, kami juga tidak serius waktu itu untuk melakukan investigasi. Tapi, pada saat ada Permen Nomor 10 Tahun 2020 terkait Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris dan Dewas BUMN yang di dalamnya memang mengizinkan, membolehkan atau bahkan dapat merangkap jabatan antara direksi dan komisaris di BUMN dengan swasta yang cenderung memang menabrak berpotensi melanggar pasal di Undang-Undang KPPU.

Saya kira itu yang menjadi penjelas kenapa baru muncul sekarang, kalau memang menjadi viral kami juga tidak menyangka. Tapi, memang betul Pak kami sudah selesaikan investigasi awal bukan hanya tiga bidang tapi sudah lengkap 9 bidang seluruh BUMN dan sudah kami koordinasikan dengan Pak Menteri BUMN. Secepatnya kita akan berubah permen tersebut dan yang kami dapat kabar langsung dari Pak Menteri sudah ada beberapa *person-person* yang ada di dalam daftar yang sudah secara sukarela mengundurkan diri di swastanya. Nanti hasil akhirnya akan kami laporkan segera, intinya sedang proses terhadap upaya merevisi pasal yang

menyatakan tentang dapat merangkap karena ini sudah jelas menabrak aturan yang ada di kami.

Memang pertanyaan yang kedua juga Pimpinan masalah tentang penambahan di tahun 2020 terkait anggaran yang dendanya tahun 2020 cukup besar. Mungkin Pak Amin tadi saya sudah sampaikan di paparan kami justru mendapat *bless in disguise* di tahun ini tahun 2021 eksekusi kami berhasil bahkan belum, ini baru bulan Mei baru bulan ke-4 maaf bulan ke-5, kami sudah melebihi target PNB 3 tahun berturut-turut ke belakang karena memang kami sadar betul rasionalisasi *refocusing* anggaran menyebabkan kami juga harus mencari cara.

Dan memang selain APBN murni kami punya kewenangan terhadap denda PNB di mana kita bisa ambil berapa persentase dari sana. Jadi, kami tertolong oleh adanya denda PNB ini. Memang tidak agak tidak layak juga kalau ke depan kita bicara mungkin Pimpinan ya sudah kalau anggaran turun terus ya kita denda terus, itu mungkin yang terpikirkan ya, apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang memungkinkan kami mendenda maksimal 100 maaf 10% dari penjualan dan 50% dari keuntungan. Tapi, saya kira bukan itulah, itu hanya salah satu cara kami di tahun ini saja bahwa memang kalau kalau memang ditekan terus ya kami juga denda terus, cara simpel sebetulnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami bahwa memang anggaran ini semua adalah kembali pada kebijakan pemerintah, kalau kami tidak dapat terus, dikurangi terus, ya kami tambah terus dendanya.

Yang kedua, yang ketiga mohon maaf ini Pak, Pak juga pertanyaan agak mirip tentang bagaimana *GoTo* ya, ini Pak Tommy juga tadi bertanya hal yang sama. Jadi, memang yang bisa kami laporkan sementara bahwa memang *GoTo* sudah sudah ada mereka masih proses di Kemenkumham proses sah secara meyakinkan hukumnya, peraturan di kami 30 hari setelah itu harus segera lapor atau kena Rp1 miliar 1 hari keterlambatan. Tapi, kemudian juga kami punya Perkum 3 Tahun 2020 Pak Amin, upaya kami untuk memberikan kelonggaran relaksasi kepada para pelaku usaha tambahan 60 hari, jadi ini kita masih menunggu.

Apa yang kami lakukan selama ini? Antisipasi yaitu penilaian awal, penilaian awal karena kami paham betul tadi Pak Tommy juga sampaikan tidak ada pasal yang dilanggar, potensinya memang betul Pak kalau kita bicara hanya tentang *marketplace*. Kalau *marketplace* masih banyaklah persaingannya masih cukup kuat, tapi dalam isu ekonomi digital maka *multi market* dari apa yang dikerjakan operasional dari Gojek dan Tokopedia itu bukan hanya *marketplace*.

Menyambung tadi Pak Deddy juga tanyakan apa yang bisa dilakukan fokusin ke depan? Ya, karena ini memang digital di dalam *merger* tersebut yang jelas ada *marketplace*, ada pembiayaan, ini pasar relatifnya berbeda pasar relevannya Pak Darmadi pasti hapal, lalu pasar relevan *deliver delivery* barang pasar relevan saya kira ada sekitar 6-8 pasar relevan dalam satu ekosistem di *platform*, jadi memang yang baru kita lakukan adalah mencoba memetakan memetakan pasar relevan yang ada dalam ekosistem *merger* aksi korporasi ini.

So far, tadi saya katakan di awal untuk *marketplace* *Insya Allah* tidak ada ke sana ya tapi kalau bicara tentang pasar relevan yang lain mohon maaf Pak Amin kami sedang bekerja bahkan ada satu yang juga mungkin minta mohon harap bantuan dari Komisi VI terkait bukan hanya pangsa pasarnya, tapi masalah penguasaan aset yaitu penguasaan *big data*. Walaupun bukan kewenangan dari kami, tapi kami melihat bahwa data *big data* ini adalah aset utama sebuah pelaku usaha syarat pelaku usaha buat menguasai pasar di ujung. Nah, ini undang-undangnya belum ada, regulasinya belum belum ada, sehingga kami belum bisa masuk ke sana tapi *Insya Allah* pertanyaan tadi Pak Amin dan Pak Tommy kami sampaikan sedang dalam proses minimal melihat potensi pasar relevan mana yang akan terpengaruh dan kita akan hindari yang namanya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat ke depan.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Izin Pimpinan.

Pak ada kalau secara persentase Pak mereka itu boleh batas maksimalnya menguasai pasar tuh berapa banyak Pak?

KEPALA KPPU:

Kalau dari undang-undang Pak Tommy, izin menjawab Pak Pimpinan.

Memang kalau satu itu melebihi 70 50% sudah sudah dianggap berbahaya, kalau beberapa 2-3 menguasai 70% itu sudah dianggap berbahaya ini saya kira karena intinya ini pengawasan *merger* tidak murni penegakan sehingga kita pasti akan lakukan dalam penilaian nanti yang namanya *remedie* artinya apa yang mungkin nanti bisa dilakukan oleh pelaku *merger* ini *merger* akuisisi ini untuk mencoba minimal setidaknya memberikan ruang agar tidak ada potensi yang tadi yang berbahaya kalau satu menguasai 50% atau 2 atau 3 menguasai lebih dari 70%.

Demikian Pak Tommy.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Tapi itu yang sulit di belakangnya ya.

KEPALA KPPU:

Betul.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Yang menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

KEPALA KPPU:

Potensinya ya potensinya.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Kalau satu, kalau hanya sampai 1 50, 2, 3 75 sih kalau hanya sampai di situ banyak yang kena ya kan.

KEPALA KPPU:

Itu makanya Pak, makanya nanti Pak Darmadi terima kasih tambahannya. Nanti Pak Tommy, ada semacam *remedie* yang yang juga sangat *clear* yang sangat *clear* kami akan minta syarat untuk mendapatkan izin terhadap *merger* tersebut mereka harus *confirm* tentang apakah ada di dalam klausul perjanjian atau AD/ART mereka terkait ya tadi Pak target target UMKM-nya mana? Kalau tidak ada di dalam dokumen ya kami akan mintakan itu karena itu salah satu syarat yang kami cukup pikir bisa ya *merger*-nya tetap jalan, tapi pasar juga tidak hanya dikuasai oleh segolongan pemilik modal saja saya kira itu.

Kemudian, juga tambahan terhadap apa yang disampaikan tadi Pak Subardi. Memang betul Pak Bardi dengan anggaran yang sangat minim bahkan dikurangi terus, kami ya kami *nggak* masalah sih kalau selama ada PNBP denda ya kami solusinya itu. Kemudian, ya memang akhirnya kita berpikir bahwa penegakan ini bukan jalan terbaik di saat Pemulihan Ekonomi Nasional juga *pasca* ya selama Covid menghantam.

Kita punya tugas 4 sebetulnya, advokasi, penegakan, pengawasan *merger*, dan pengawasan kemitraan. Hal-hal yang sifatnya tambahan dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 7 ya Pak Kukuh ya PP 7 Tahun 2021 menyebabkan kami mencoba menggeser target bukan hanya penegakan tapi juga kemitraan karena kami bukan pembina, kami tidak ada tugas membina, kami tugasnya mengawasi kemitraan UMKM dengan pelaku. Jadi Insya Allah bulan Juli awal ini ada yang ke situ ada di Jogja KPPU sesuai dengan rencana di renstra kami 2020-2024 kami akan membuka kanwil baru di Jogja dengan pusat kemitraan yang kita akan jadikan kayak rumah inkubator bagi para pelaku usaha yang ingin butuh mitra atau UMKM yang juga butuh ruangan untuk meminta *coaching* dari pelaku usaha besar. Ini sudah sudah jalan insya Allah mungkin Pak tadi saya ke Pak Subardi Kang Mas di Jogja ini akan akan jadi apa KPPU *new approach*-lah dalam situasi yang sulit seperti ini.

Nanti Ibu Melani juga sekalian menjawab. Ada memang Bu apa namanya kisah sukses gitu ya tapi bukan UMKM sebetulnya, tapi itu mitra, mitra dari salah satu pelaku usaha besar yang kita berikan bantuan melalui pengawasan bahkan sampai ke tingkat pemeriksaan *alhamdulillah* ada perubahan perilaku itu nanti akan menjadi contoh bagi semua UMKM di semua daerah. Tapi, sekali lagi memang kanwilnya belum diresmikan insya Allah tanggal berapa Pak Sekjen, tanggal 7? Tanggal 10 Juli, Kanwil VII KPPURI dengan Pusat Kemitraan UMKM.

KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. / F-PG):

Iya. Oke, Pak Bardi nanti mungkin tanggal 10 itu datang di pembukaan.

KEPALA KPPU:

Karena kebetulan kebetulan Pak Bardi yang dan Pak Bardi banyak konstituen UMKM-nya alhamdulillah.

KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. / F-PG):

Oh gitu, oke.

KEPALA KPPU:

Belum Pak, kami masih punya target berapa lagi Pak Sekjen? 4 lagi ya sampai tahun 2024 ya, kanwil? 3 lagi ya 3 lagi insya Allah nanti kita akan coba.

KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. / F-PG):

Oke Pak.

KEPALA KPPU:

Yang terakhir Pak Pimpinan.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Izin Pak KPPU, untuk sosialisasi KPPU di daerah Jakarta Selatan?

KEPALA KPPU:

Siap siap Bu Melani siap akan nanti Pak Sekjen akan akan urus hal seperti itu. Ini Pak Nyoman ada yang menarik Pak, ini juga salah satu yang sifatnya menjawab Pak Deddy yang tanyakan tadi kenapa anggarannya kok tipis-tipis begitu bedanya. Ya jawabannya sangat singkat saja Pak memang anggarannya sangat terbatas dengan pagu sedemikian memang tidak bisa kita bergerak terlalu banyak artinya memang jumlah perkara yang ingin kita lakukan lagi pula kan tadi saya sudah sampaikan bukan perkara apa yang dicari tapi solusi dari bagaimana UMKM bisa muncul, ekonomi tidak macet. Kami juga tidak ingin mempersulit pelaku usaha karena memang situasinya sulit untuk semua.

Dan yang menarik menyambung apa yang Pak Nyat Kadir juga dan Pak Deddy. Ini contoh saja Pak, keberhasilan kami misalkan dalam kaca mata fokusnya ke mana sekarang? Fokusnya ke kemitraan dan digital. Panitera itu tahun 2020 itu Rp8,5 miliar Pak, tapi sekarang setelah semuanya hampir 70% ya Pak, digital tahun 2021 turun ke Rp3,5 miliar. Nah, kenapa tahun 2022

naik lagi menjadi *lima koma enam tiga*? Karena perkaranya mulai kita tambah Pak, kita berharap ekonomi mulai pulih, relaksasi yang kita gunakan juga kita akan tarik kembali, jadi penambahannya tidak tidak sama sekali tidak sebetulnya tidak tidak signifikan gitu karena mungkin tertolong oleh pendekatan kami fokus kami di digital *approach* untuk semua kegiatan kami.

Mungkin ada tambahan izin Pak Pimpinan. Cukup Pak, terima kasih banyak.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. / F-PG):

Wa'alaikumsalam.

Ada interupsi, sebentar ini belum ini sebenarnya. Silakan interupsi boleh semenit saja ini karena jamnya sudah kita. Jadi, ya Ketua KPPU mungkin nanti kita kita tahu bahwa kita ini kan menghadapi pandemi, maka dari itu kalau sebisa mungkin *the wise* dalam menghadapi apa pandemi ini, kegaduhan dikurangi juga gitu, tapi tujuannya yang penting itu tujuan tujuan dari keberadaan KPPU itu yang menjadi tujuan utama kalau masih bisa dirundingkan sesama di pemerintahan untuk dirundingkan ke sesama pemerintahan yang penting tujuannya lebih banyak yang harus dicapai ketimbang kegaduhan itu sendiri. Silakan Pak Wakil Kepala BP Batam.

WAKIL KEPALA BP BATAM:

Terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI,

Terima kasih atas pertanyaannya saya akan mencoba menyampaikan informasi terkait dengan masing-masing pertanyaan.

Yang pertama dari Pak Subardi pertanyaan intinya adalah bahwa apakah dalam kondisi Covid terutama infrastruktur itu mendesak? Mungkin, kami mencoba menyampaikan info awal dari tadi kami dulu Pak bahwa sebenarnya BP Batam itu adalah disebutnya Badan Pengusahaan yang keuangannya dikelola secara BLU. Jadi, ada suatu hal yang sifatnya konflik-Pak, konfliknya adalah tadi kami sebagai BLU itu memberikan pelayanan dalam rangka mendorong investasi dan ekspor. Dalam rangka mendorong investasi ini tugasnya antara lain adalah memberikan insentif, memberikan pelayanan atau perizinan, kemudian termasuk menyediakan infrastruktur dan juga kesehatan. Terkait dengan infrastruktur misalnya kita harus menyediakan pelayanan di bandara, di pelabuhan, kemudian di rumah sakit maupun ada hal-hal lain seperti termasuk pelayanan haji.

Kemudian karena BLU Bapak Pimpinan dan Anggota yang kami hormati, sebetulnya anggaran kami diutamakan untuk mencari sendiri. Jadi, ada dua hal yang sebenarnya agak konflik, di satu sisi kalau kita dalam melakukan investasi paling banyak adalah *call center* bukan insentif, pelayan, dan lain-lain. Dalam rangka mencari PNBP kami menyelenggarakan pengelolaan aset yang notabene berarti ketika pungut PNBP tidak boleh

terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi akan memberatkan investasi itu sendiri, itu yang kemudian dalam tugas kami harus mencari optimalisasi bagaimana kegiatan di BP itu berhasil. Oleh karena itu, kalau kami menghasilkan PNBPN tentu saja tidak bisa kami dorong semaksimal mungkin karena itu pasti akan mengganggu investasi misalnya akan menaikkan biaya logistik atau biaya pelayanan dan lain-lain.

Dengan kondisi itu Bapak Pimpinan dan Anggota kalau ada pertanyaan tadi bahwa bisakah kalau tidak ada APBN? Sebenarnya, kalau kondisi *business as usual* bisa, kalau nanti bisa jalan pelan-pelan dan tidak dalam Covid kita melayani dalam kondisi yang *medium*, kemudian dengan PNBPN kami sendiri itu bisa berjalan tapi tentu saja perkembangannya tidak terlalu progresif. Kalau kita ingin mencapai hasil yang jauh di atas kondisi yang biasa tentu saja perlu dukungan dari sumber dan lain-lain yaitu yang pertama yang kesatu adalah APBN-nya karena itu adalah PNBPN sendiri sebenarnya APBN Bapak Pimpinan dan Anggota tapi kalimat mungkin di sini adalah oleh Pak Abdul Hakim rupiah murni atau pinjaman luar negeri. Kami tentu saja masih tetap memerlukan dukungan rupiah murni atau pinjaman luar negeri utamanya kalau akan diutamakan untuk memperoleh hasil yang sangat tinggi, apalagi dalam kondisi Covid.

Dalam kondisi yang ada ini Bapak Pimpinan dan Anggota sebetulnya ini di historis Pak Deddy Sitorus, kami sampaikan begini Pak bahwa kami menyadari adanya perang dagang, ada kondisi Covid dan lain-lain. Malah kemudian untuk 2021 kami sampaikan kami mendorong belanja dari penggunaan saldo dalam rangka menyediakan infrastruktur, sehingga harapannya dengan berhasilnya pembangunan itu persepsi positif bagi dari Batam kepada investor meningkat dan juga kualitas pelayanan kami juga meningkat. Dan saya rasa itu kondisi yang sangat berhasil tadi udah disinggung oleh Pak Nyat Kadir bahwa untuk tahun 2020 dari target investasi kami yang sekitar Rp15 triliun tercapai sekitar Rp22 triliun.

Kemudian untuk tahun 2021 target kami naik lagi menjadi Rp25 triliun, tetapi dari Pak Menko selaku Ketua Dewan Kawasan kelihatannya akan meningkatkan target itu menjadi sekitar tidak lebih dari Rp30 triliun. Untuk 2022 waktu itu kajian kami dengan sifatnya *business as usual* sekitar Rp30 triliun, tapi ada arahan sementara yang masih dalam wacana untuk mencapai sekitar Rp60 triliun investasinya. Tentu saja kalau ada hal demikian Bapak Pimpinan dan Anggota bahwa ada target kenaikan investasi yang sangat signifikan, kemudian dukungan dana dari APBN yang tadi sudah disinggung oleh Pak Abdul Hakim menjadi makin *urgent* bagi kami.

(suara tidak jelas) menambahkan bahwa tadi kalau terkait pertanyaan apakah belanja itu memang riil mendorong investasi? Ini kami bisa sampai ilustrasi untuk proyek-proyek yang di bandara itu dengan adanya KPPU dengan dukungan belanja rupiah murni yang relatif kecil diharapkan akan menghasilkan investasi sebesar Rp6,8 triliun. Kemudian di pelabuhan ada proyek investasi yang akan masuk untuk dukungan kerja sama dengan pihak lain untuk pelabuhan sekitar Rp4 triliun investasi mau masuk. Kemudian Rumah Sakit BP Batam ada dukungan terkait dengan KEK Bapak Pimpinan dan Anggota ada potensi untuk naik sekitar Rp3,1 triliun. Jadi dengan anggaran infrastruktur yang sebetulnya cukup sedikit ya karena totalnya kami

belanja adalah Rp2 triliun investasi yang diperkirakan naik ini tadi sekitar Rp13 triliun yang langsung yang langsung ke proyek-proyek kegiatan kami di aset-aset kami dan investasi yang sifatnya terkait dengan kawasan industri dan lain-lain harapannya adalah sekitar Rp30 triliun. Jadi, kalau ditanyakan apakah infrastruktur itu mendesak kami mengatakan bahwa dalam kaitannya dalam mencari investasi yang cukup tinggi beda dengan *business as usual* dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai dampak Covid kami sangat memerlukan dukungan belanja dari rupiah murni.

Kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Tommy Kurniawan mengenai sebenarnya di sini adalah belanja barang dan jasa lainnya Pak sebesar Rp1,73 miliar nih kecil infonya adalah untuk pengambilan UWT Pak. Jadi, ada investor di Batam itu lahannya kan sifatnya menyewa sehingga membayar sewa, ada kondisi tertentu itu kita harus mengembalikan UWT-nya ini ada sekitar Rp1,73 miliar untuk tahun 2022. Jadi, nanti kalau mungkin Bapak memerlukan info mengenai apa kondisi yang memerlukan pengembalian UWT nanti izin Pak Deputy III untuk menyampaikan.

Kemudian dengan pertanyaan Pak Deddy Sitorus, saya rasa sudah kami singgung bahwa kami memang dibanding dengan tahun-tahun lainnya tentu saja dalam apa kondisi pandemi di mana tempat lain juga ekonominya lagi melambat maka semacam target untuk BP Batam itu meningkat sehingga kami memerlukan tadi yang di 2021 saldo kami kami pakai hampir setengah miliar, setengah triliun maaf, kemudian kami minta dukungan rupiah murninya lebih tinggi. Dan terkait dengan ini *output*-nya Bapak Pimpinan dan Anggota ada potensi investasi di 2021 yang dalam proses yang sudah mulai intensif sekitar Rp30 triliun. Ada berapa yang lagi menjajaki mungkin kalau di bisa ketemu nanti minatnya dengan potensi di Batam bisa mencapai di atas Rp50 triliun.

Kemudian yang terakhir terkait dengan pertanyaan Bu Melani kami menyampaikan info bahwa BP Batam adalah satu KPI Ibu adalah pembangunan destinasi wisata yang pro UMKM, pro edukasi, dan pro lingkungan. Jadi, kami di BP Batam ini juga fokus untuk mendorong pengembangan UMKM di dalam batas-batas tertentu karena BP Batam memang FTZ sehingga harapannya kalau UMKM ini akan biasanya kalau kami di **(suara tidak jelas)** UMKM ketika mereka memperluas pasaran keluar Batam itu akan menjadi lebih berat tantangannya karena di Batam rata-rata itu semuanya udah murah gampangya begitu mau keluar jadi lebih mahal itu kira-kira.

Mungkin demikian Pimpinan yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. / F-PG):

Ya kita punya waktu 10 menit ini, boleh sedikit ya.

F-PKS (RAFLI):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. / F-PG):

Kalau bisa tentang anggaran ya.

F-PKS (RAFLI):

Terima kasih Ketua.

Teman-teman Anggota semuanya,

Para mitra juga.

Saya mungkin mau masuk ke BPKS saja yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala BPKS ya bagaimana kewenangan BPKS sebenarnya di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh ya meliputi semua sektor publik sebenarnya ini juga disayangkan sebenarnya juga, mengapa hari ini kita masih begini-begini terus gitu ya.

Saya hanya ingin meminta ada pendapat pakar hukum kami ada Profesor Mawardi hari ini menjadi Dewan Pengawas Sabang juga BPKS Sabang, sebaiknya Profesor coba disampaikan sedikit bagaimana wilayah kewenangan kekhususan Aceh itu seperti apa supaya kita jangan berlarut-larut dalam persoalan ini hingga kita bisa menyusun konsep baru untuk memajukan Sabang dan Aceh secara keseluruhan, silakan Prof.

KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. / F-PG):

Sebentar, sebentar, sebentar, ada Pimpinan di sini lewat Pimpinan dulu. Jadi, bukan duduk di Pimpinan jadi Pimpinan. Begini mungkin jelasinnya cukup singkat dan padat karena pada hari ini kita rapat rapat anggaran, nanti ada pada porsinya rapat pengawasan ada ya, rapat legislasi juga ada gitu. Oke boleh di rapat dijelaskan toh nanti juga ada kita punya wakil di sini, Bapak punya wakil dari Aceh di kebetulan di Komisi VI nanti pada rapat-rapat di dengan mitra kerja kita yaitu dengan apa dengan perdagangan ya ada maupun dengan perindustrian nanti Pak Rafli mungkin bisa bicara banyak tentang itu. Boleh saja memberikan sebagai sebagai apa sebagai gambaran sedikit, tapi jangan terlalu melebar ya Prof. Terima kasih Prof.

PROF MAWARDI:

Baik.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mohon izin Pimpinan dan Bapak-bapak sekalian.

Saya hanya ingin menambahkan dan juga memenuhi permintaan yang terhormat Bapak Rafli. Sebenarnya tadi udah disampaikan oleh Bapak Kepala BPKS tentang *problem* regulasi yang mengatur Sabang itu. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang melengkapi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 itu diatur bahwa untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang itu dia bebas dari tata niaga, ini tidak ada dalam Undang-Undang 37, adanya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, kenapa adanya? Karena itu juga masalahnya. Dulu karena gula itu

termasuk barang yang tata niaganya diatur, maka dia nggak bisa masuk tanpa izin Menteri Perdagangan. Nah, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dinyatakan secara tegas bahwa dia bebas tata niaga, itu latar belakang lahirnya pasal tersebut.

Nah, kemudian pada tahun 2020 setelah itu berjalan dengan baik sebelumnya, tiba-tiba Menteri Perdagangan membuat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2020 yang berlakunya itu untuk seluruh Indonesia sebenarnya. Seharusnya ada satu pasal yang mengecualikan untuk Sabang, tapi itu tidak dikecualikan sehingga dengan demikian untuk Sabang kebutuhan masyarakat Sabang pun akan gula sekarang harus ada izin dari Menteri Perdagangan. Nah, untuk mengatasi masalah ini pihak manajemen BPKS juga telah mencoba untuk melakukan advokasi ke pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dan juga melalui Kementerian Ekonomi.

Terakhir sudah ada rapat bersama antara BPKS dengan Kementerian Ekonomi, termasuk juga Kementerian Perdagangan yang membahas masalah dan sudah disepakati bahwa Peraturan Menteri itu tidak direvisi tetapi Menteri Perdagangan akan membuat Peraturan Menteri Perdagangan yang lain khusus tentang Sabang, tapi alhamdulillah sampai sekarang *nggak* dibuat-buat Pak, itu masalahnya.

Saya kira ini sekedar tambahan.

Terima kasih atas kesempatannya.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Pimpinan, minta 1 menit, 1 menit.

KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. / F-PG):

Silakan.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Dalam kesempatan ini saya langsung ke KPPU. Perlu diingat bahwa Undang-Undang 5/99 KPPU adalah anak kandung Komisi VI, maka kita memberikan *support* yang luar biasa. Perlu diingat asas pembentukan dan tujuan pembentukan, dasarnya adalah demokrasi ekonomi, tujuannya Pasal 3 adalah mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu kepada setiap kegiatan yang memang betul-betul yang benar-benar melanggar dan ada dugaan, mohon KPPU jangan takut. Bapak mendapat *support* dari Komisi VI untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tekanan dan apa pun yang terjadi mohon disampaikan kepada Komisi VI untuk kita mendukung Bapak, Ibu sekalian.

Bapak Ibu *nggak* usah takut ya Bapak Ibu ngomong di media juga *nggak* usah takut, Bapak Ibu kaji itu mendalam yang penting dikaji mendalam tanpa intervensi apa pun agar mendapatkan *output* yang baik.

Nah, itu salah satu poin yang hari ini yang ingin saya sampaikan dari Fraksi PDI Perjuangan. Sebentar Ketua dari Fraksi PDIP Perjuangan penting.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. / F-PG):

Ya karena udah udah nyampe di situ. Jadi, semua di sini mendukung karena itu bukan hanya PDIP Pak semua mendukung KPPU ini karena kita bermitra kita pasti dukung untuk apalagi itu urusannya untuk kepentingan kita bernegara, berbangsa yang lebih baik pasti didukung Pak tenang aja Pak. Sama Pak pembahasan sama kita di Golkar juga sama di teman-teman yang lain juga sama mendukung keberadaan Bapak tentunya karena kita bermitra yang tentu juga *check and balance* penting juga Pak. Jangan sampai tidak juga terjadi *check and balance* itu gitu dan jangan juga menjadi *super power* Bapak nanti juga gitu jangan ini.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Itulah makanya kajiannya harus mendalam Pak.

KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P. / F-PG):

Itu Pak ya semua kami semua pada prinsipnya kita semua di sini duduk untuk kepentingan bernegara yang lebih baik. Selanjutnya saya ambil kesimpulan Pak ya, silakan.

Draft Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPRRI dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU), dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Pembahasan RKP dan RKA K/L Tahun 2022, Selasa 8 Juni 2021.

A. Badan Standardisasi Nasional (BSN).

1. Komisi VI DPRRI menerima penjelasan dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-361/MK.02/2021 dan B238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021, telah ditetapkan Pagu Indikatif Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp219.677.133.000,- yang terdiri atas:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp149.867.260.000,-; Pak angkanya tolong dicek Pak, nanti kalau salah Bapak interupsi ya, sekalian biar ini biar cepet ini kita ngomong ya.
 - b. Program Standardisasi Nasional sebesar Rp69.809.873.000,-.

Betul Pak ya semua ya, kita ketuk ya?

(RAPAT:SETUJU)

2. Komisi VI DPRRI menerima penjelasan dan mendukung pengajuan usulan tambahan anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp34.000.000.000,-.

Betul Pak ya?

(RAPAT:SETUJU)

B. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

Sebentar Pak, ini kita harus pisahkan ini Pak. ini karena keputusan masing-masing yang harus dikirim ke masing-masing. Jadi, tidak bisa dijadikan satu ini sebenarnya. Jadi, atasnya beda-beda, jadi tidak A, B ini. Satu-satu Pak karena badan-badan ini masing-masing badan berbeda-beda ini, saya juga baru *engeh* 2 di B-nya. Sabar sedikit. Oke, kesimpulan katanya bisa begini nanti laporan ke Banggarnya sendiri-sendiri, ya Pak ya. Terus lanjut yang berikut.

B. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

1. Komisi VI DPRRI menerima penjelasan dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-361/MK.02/2021 dan B238/M. PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021, telah ditetapkan Pagu Indikatif Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp99.726.648.000,-;

keterangannya mana itu, keterangannya belum itu angkanya oh bawah ya, A terdiri atas:

- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp83.318.625.000,-.
Benar Pak ya?
- b. Program Pengawasan Persaingan Usaha sebesar Rp16.408.023.000,-.

Betul Pak ya, saya ketuk ya?

(RAPAT:SETUJU)

2. Komisi VI DPRRI menerima penjelasan yang mendukung pengajuan usulan tambahan anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu Komisi itu i-nya kurang. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp176.215.151.000,-.

Betul Pak ya?

(RAPAT:SETUJU)

C. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

1. Komisi VI DPRRI menerima penjelasan dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP

Batam) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-361/MK.02/2021 dan B238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021, telah ditetapkan Pagu Indikatif BP Batam Tahun Anggaran 2022 Rp2.273.250.629.000,- yang terdiri atas:

- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.021.374.848.000,-;
- b. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp1.251.875.781.000,-.

Betul ya Pak angkanya ya?

(RAPAT:SETUJU)

2. Komisi VI DPRRI menerima penjelasan dan mendukung pengajuan usulan tambahan anggaran Badan Pengawas Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun Anggaran 2022 berupa Rupiah Murni sebesar Rp461.242.371.000,-.

Betul Pak ya?

(RAPAT:SETUJU)

D. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).

1. Komisi VI DPRRI menerima penjelasan dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-361/MK.02/2021 dan B238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021, telah ditetapkan Pagu Indikatif BPKS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp77.473.783.000,- yang terdiri atas:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp41.681.770.000,-;
 - b. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp35.792.013.000,-.

Pak Kepala, benar ya angkanya?

(RAPAT:SETUJU)

E. Komisi VI akan membahas masing-masing program lebih lanjut secara detail dalam Rapat Dengar Pendapat.

Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

F. Komisi VI DPRRI memberikan waktu kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPRRI.

(RAPAT:SETUJU)

Demikian Rapat hari ini, apa ada kata penutup? Cukup ya kayaknya Pak ya, oke. Maka dari itu dengan mengucapkan *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*. Om Santi Santi Om. Shalom.

Saya tutup rapat pada hari ini.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.59 WIB)

Jakarta, 8 Juni 2021
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP.197104071992032001